

Nomor : B-10/KP.06/SJ/08/2025 Jakarta, 8 Agustus 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS) Angkatan VII sampai dengan XII Tahun 2025

Kepada Yth.

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota se-Bengkulu
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota se-D.I Yogyakarta
3. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota se-DKI Jakarta
4. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota se-Gorontalo
5. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota se-Jambi
6. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota se-Jawa Barat
7. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota se-Jawa Tengah

Di

Tempat

Sesuai dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa setiap pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2025 akan merujuk pada kebijakan baru yaitu Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

Bersama ini kami beritahukan Badan Pengawas Pemilihan Umum akan menyelenggarakan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan VII sampai dengan XII Tahun 2025. Berkaitan dengan hal tersebut kami sampaikan pemanggilan calon peserta Pelatihan Dasar CPNS dengan jumlah **264 orang** untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pelatihan. Terkait dengan penyelenggaraan pelatihan dimaksud, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembelajaran Pelatihan Latsar CPNS Angkatan VII sampai dengan XII akan dimulai tanggal **15 Agustus 2025 s.d 13 November 2025**;
2. Pembelajaran akan dilaksanakan secara ***Distance Learning***, dimana peserta pelatihan akan melakukan pembelajaran dengan metode Pelatihan Mandiri (***MOOC***), dan metode ***Distance Learning*** (pembelajaran jarak jauh, Adapun detail jadwal terdapat pada **Lampiran I**;
3. Peserta yang ditugaskan diharapkan membaca "Informasi Awal" sebagaimana terdapat dalam **Lampiran I** dan memenuhinya. Peserta wajib ***dibebastugaskan*** dari penugasan lain selama tahap pembelajaran ***Distance Learning***;

4. Sistem Penyelenggaraan Latsar CPNS menggunakan pendekatan *Experiential Learning* yaitu peserta Pelatihan juga akan melakukan pembelajaran berdasarkan pengalaman di tempat kerja yang akan dibimbing oleh atasannya langsung sebagai mentor.

Oleh karena itu mohon untuk menyampaikan daftar mentor yang telah ditunjuk oleh Pimpinan Unit Instansi. Surat penugasan calon peserta dan daftar mentor calon peserta, kami terima paling lambat tanggal **25 Agustus 2025**;

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi *contact person* Sdri. Umi Khumairoh (085715477478). Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

SEKRETARIS JENDERAL



ICHSAN FUADY

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI
2. Anggota Bawaslu RI

Lampiran I

Nomor : B-10/KP.06/SJ/08/2025

Tanggal : 8 Agustus 2025

INFORMASI AWAL BAGI CALON PESERTA PELATIHAN DASAR CPNS TAHUN 2025

A. SIFAT DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Angkatan VII sampai dengan XII Tahun 2025 bersifat "**Distance Learning**" yaitu pelatihan yang dilaksanakan secara full Virtual Learning. Tahap Pertama **Pelatihan Mandiri** yaitu peserta mengikuti pembelajaran secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi **MOOC (Massive Open Online Course)** yang disediakan oleh LAN, dilanjutkan dengan pembelajaran menggunakan metode **Distance Learning** yaitu menghubungkan peserta dengan fasilitator secara *e-learning* dari tempat kedudukan masing-masing peserta. Pelatihan akan dilaksanakan ± 3 bulan mulai dari tanggal **15 Agustus s.d 13 November 2025**. Adapun Tahapan Pelatihan adalah sebagai berikut:

NO	TAHAP	TANGGAL	SIFAT	TEMPAT
1.	Pembelajaran Mandiri melalui MOOC	15 Agustus - 23 Agustus 2025	Massive Open Online Courses (MOOC)	Tempat masing-masing peserta
2.	Registrasi Peserta	15 Agustus - 22 Agustus 2025	bit.ly/RegistrasiLATSARBAWASLU2025	
3.	Pembukaan	25 Agustus 2025	Online melalui zoom meeting	
4.	Distances Learning I (Pembelajaran Jarak Jauh)	1 September s.d 2 Oktober 2025	E-Learning (Kelas Virtual)	
5.	Seminar Evaluasi Rancangan Aktualisasi	1 Oktober 2025		
6.	Aktualisasi di Tempat Kerja	3 Oktober s.d 6 November 2025	Off Campus	Instansi Peserta
7.	Distance Learning II	10 – 13 November 2025	E-Learning (Kelas Virtual)	Tempat masing-masing peserta
8.	Evaluasi Pelaksanaan	11 November		

	Aktualisasi	2025		
--	-------------	------	--	--

B. PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN

1. Penyelenggaraan Pelatihan Dasar dimulai dengan pembelajaran secara mandiri dengan mengakses laman <http://swajar-asnpintar.lan.go.id/> menggunakan username: NIP dan password: NIK. Terkait panduan MOOC dapat disimak melalui tautan berikut <https://youtu.be/puwf2vJ5OT4>.
2. Scan Surat Tugas Mentor Peserta yang telah ditandatangani pimpinan unit instansi, diunggah oleh perwakilan instansi pada bit.ly/STMentorLATSAR2025 dan konfirmasi ke Sdri. Umi Khumairoh (085715477478). paling lambat tanggal **25 Agustus 2025**.
3. Pendaftaran:
 - a. Masing-masing Peserta yang sudah ditugaskan dapat melakukan registrasi secara online melalui bit.ly/RegistrasiLATSARBAWASLU2025 pada tanggal **15 Agustus - 22 Agustus 2025**.
 - b. Pada saat registrasi online peserta Latsar CPNS Angkatan VII sampai dengan XII harus mempersiapkan dokumen yang akan diunggah pada bit.ly/RegistrasiLATSARBAWASLU2025 antara lain:
 - 1) Setiap peserta wajib mengisi seluruh biodata yang tersedia pada link registrasi;
 - 2) **Scan** SK. CPNS;
 - 3) **Scan** Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
 - 4) **Scan** Surat Pernyataan Kesiapan bermaterai (Formulir terlampir);
 - 5) **Scan** Pakta Integritas
 - 6) Softcopy Pasfoto 4x6 dengan latar belakang Merah, atasan kemeja Putih polos serta berdasi Hitam (kerudung hitam bagi yang menggunakan).

C. LAIN-LAIN

1. Selama pembelajaran secara *Distance Learning* berlangsung peserta diwajibkan menggunakan kemeja berwarna putih lengkap dengan dasi hitam (hijab berwarna hitam bagi yang menggunakan) serta bawahan hitam (**Senin – Rabu**) dan Batik/kain nusantara (**Kamis - Sabtu**) rapi dan sopan. Tidak diperkenankan menggunakan kaos dan celana jeans selama pelatihan berlangsung;
2. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Umi Khumairoh (085715477478).

CONTOH FORMULIR

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN

Sehubungan dengan persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Bawaslu Angkatan VII sampai dengan XII Tahun 2025, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
(dengan gelar)
NIP :
Instansi :
Jabatan :

menyatakan bersedia untuk memenuhi segala ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS. Apabila dikemudian hari ternyata saya ingkar terhadap surat pernyataan kesediaan yang saya buat ini, maka saya bersedia dituntut secara hukum.

Demikian surat pernyataan kesediaan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

...diisi nama kota, tanggal bulan tahun....

Yang Menyatakan,

Meterai

Rp.10.000,-

..... diisi nama jelas

**PAKTA INTEGRITAS
PESERTA PELATIHAN DASAR CPNS BAWASLU
TAHUN 2025**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Unit Kerja :

Instansi :

dengan ini menyatakan komitmen saya untuk:

1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan untuk melaksanakan tugas jabatan secara profesional yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat;
2. Menjaga perkataan, perilaku, sikap dan saling menghormati serta menghargai fasilitator, antar Peserta, dan penyelenggara;
3. Mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku sebagaimana telah ditetapkan dalam Tata Tertib Pelatihan;
4. Tidak melakukan plagiarisme dan melibatkan *ghost writer* dalam pembuatan semua produk pembelajaran;
5. Menghindari hal-hal yang bertentangan dengan hukum, termasuk gratifikasi kepada fasilitator maupun penyelenggara;
6. Wajib hadir mengikuti tahapan pembelajaran *Distance Learning* dan tidak meninggalkan kegiatan pembelajaran, kecuali setelah mendapat ijin dari Penyelenggara; dan
7. Dinyatakan gugur sebagai Peserta dan dikembalikan ke instansi apabila melalaikan serta melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

Komitmen ini saya nyatakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan keikhlasan. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jakarta, 2025

Saya yang berkomitmen

Nama

NIP.

Lampiran II**Nomor** : B-10/KP.06/SJ/08/2025**Tanggal** : 8 Agustus 2025**PESERTA PELATIHAN DASAR CPNS GELOMBANG 2 (ANGKATAN VII SAMPAI DENGAN XII) TAHUN 2025 TANGGAL 15 AGUSTUS S.D 13 NOVEMBER 2025****ANGKATAN VII**

NO	NIP	NAMA	JABATAN	ASAL INSTANSI
1	200002282025052003	Oon Malang Sari	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Bengkulu Selatan
2	199908112025051002	Muhammad Alpin Fikri	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Bengkulu Selatan
3	199609032025051005	Resi Iskandar	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Bengkulu Tengah
4	199507292025051004	Yulianto	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Bengkulu Tengah
5	199412312025051002	Rajiv Windi Tristana	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Bengkulu Tengah
6	199302112025052001	Monalisa	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Kab. Bengkulu Utara
7	200101292025052006	Cintia Trikartika	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Bengkulu Utara
8	200009142025052005	Adinda Putri Khoerun Nissa	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Bengkulu Utara
9	199304032025051001	Himawan Fauzi	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Kaur
10	200012022025051004	Wandani Al Hafiz	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Kaur
11	200106032025051002	Muhammad Roji Rahman	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Kaur
12	198912302025052001	Atika Sri Rahayu	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Kepahiang
13	199501242025052001	Dwi Sumartin	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Kepahiang

14	200009272025051007	Sefran Adika Putra Pratama	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Kepahiang
15	200208112025051001	Iga Fernando	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Lebong
16	199406292025051003	Alpredo Simamora	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Lebong
17	199302242025051001	Wahyu Rahmat	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Lebong
18	199702222025051002	Perdinan Najib	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Mukomuko
19	199510062025052003	Anggi Puspita Sari	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Mukomuko
20	199801032025052004	Ulfa Ramadhani	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Mukomuko
21	200006162025052006	Meta Alda Yana	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong
22	199505132025052006	Dara Ayu Wulandari	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong
23	199706282025052003	Anisah Devia Utami	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong
24	199710132025051003	Alga Rizky Okthadinata	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seluma
25	199503022025051002	Mario Ramadhana	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seluma
26	199412052025051002	Muhammad Aby Pramana	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seluma
27	200009242025052003	Amelia Saptaliana	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kota Bengkulu
28	199708022025051004	Bagus Trinugroho Ardyanto	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kota Bengkulu
29	200002212025052006	Irma Damaianti	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kota Bengkulu
30	199706202025051003	Dika Wahyu Wiguna	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Provinsi D.I. Yogyakarta
31	2000060420250520	Lili Dwi Hastuti	Penata Laksana	Sekretariat Bawaslu

	04		Barang Terampil	Provinsi Yogyakarta	D.I.
32	199607072025052005	Rosyana Ayu Kusuma	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Provinsi Yogyakarta	Bawaslu D.I.
33	199803292025051003	Tedi Gunawan	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Sekretariat Provinsi Yogyakarta	Bawaslu D.I.
34	200010132025052008	Akhira Putri Oktavian	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Provinsi Yogyakarta	Bawaslu D.I.
35	200105202025052001	Firdha Salsabila	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Sekretariat Kab. Gunung Kidul	Bawaslu
36	199903022025051003	Mukhlis Nurrosyid Haryanto	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Kab. Gunung Kidul	Bawaslu
37	199306132025052003	Prima Ratih Tunjungsari	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Kab. Gunung Kidul	Bawaslu
38	200205012025052005	Aurelia Syifa Diva Khairunnisa	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Sekretariat Kab. Kulon Progo	Bawaslu
39	199501052025051006	Riga Nor Afandi	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Kab. Kulon Progo	Bawaslu
40	199605252025051005	Taufiq Triyoga Raharjo	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Kab. Kulon Progo	Bawaslu
41	199607112025052004	Anita Aryani	Penata Laksana Barang Terampil	Sekretariat Kabupaten Bantul	Bawaslu
42	199804282025052003	Savriilia Poernama Sari	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Kabupaten Bantul	Bawaslu
43	199703302025052001	Indri Lestari	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Kabupaten Bantul	Bawaslu
44	200101252025052004	Tiara Zalfaaron Mela Azzahra	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Sekretariat Kabupaten Sleman	Bawaslu

ANGKATAN VIII

NO	NIP	NAMA	JABATAN	ASAL INSTANSI
1	199804082025052003	Siti Nur Mahmudah	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Kabupaten Sleman
2	199608272025052005	Kunthi Amanah	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Kabupaten Sleman
3	199310192025052001	Wandaning Ayu Satiti	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Sekretariat Kota Yogyakarta

4	200103132025051005	Rifqi Fatkurrahman	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta
5	199901102025051002	Rhamadan Kurniawan	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta
6	200108072025051005	Afdal Fajriansyah	Penata Laksana Barang Terampil	Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
7	199402282025052001	Dessy Febrina Sari	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
8	199609212025051003	Shandy Fernandhito Ambarita	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
9	200109142025052002	Sonia Indira Muthi	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
10	199706192025052002	Nesia Risma Sita Yunisa	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
11	199310132025052001	Nana Nadliroh Mayangsari	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Administrasi Kepulauan Seribu
12	199904062025052006	Ika Ayuwandari	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Administrasi Kepulauan Seribu
13	199709252025051002	Muhammad Cahya Nugraha	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Administrasi Kepulauan Seribu
14	200012152025052004	Divina Fitriana	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat
15	199902172025052006	Gabriella Yosma Lasmi Pujianti	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat
16	199412162025052005	Derinah	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat
17	200106242025052003	Icha Putri Damayanti	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Selatan
18	199911212025052005	Nova Nityasa	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Selatan
19	199802212025052001	Siti Rodiyah	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Selatan
20	199701032025052002	Jessica Ester Indriani	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur

21	199404252025052001	Sherly Novitasari	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur
22	199904142025051006	Muhammad Syahrul Yudistira	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur
23	199403242025052001	Martha Aryani Situmorang	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara
24	199907172025052004	Ruth Grace Fabiolla	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara
25	199009162025052003	Septia Yustanti	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara
26	199409262025051002	Farhan Walid	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat
27	200003052025052007	Marina Saputri	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat
28	200203032025052006	Adinda Mustika Habiballoh	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat
29	199806222025052003	Kintan Adinta Putri	Penata Laksana Barang Terampil	Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo
30	199312072025052001	Melisa Ld. Sadiq	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo
31	199110012025052003	Saktiyanti Tolinggi	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo
32	199906022025052001	Andi Irfani Kartika	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo
33	199001172025051001	Muhammad Arief Musa	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Boalemo
34	199609172025051001	Risal Bobihu	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Boalemo
35	199608192025051002	Zia Ulhaq A Badu	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Boalemo
36	199911152025052004	Novita Marbun	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Kab. Bone Bolango
37	199505152025051007	Alvin Arsyad	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Bone Bolango
38	199108122025051001	Risman Nu	Penata Kelola Pengawasan	Sekretariat Bawaslu Kab. Bone Bolango

			Pemilihan Umum Ahli Pertama	
39	1992123120250510 02	Bagus Rendy Priambudi	Penata Laksana Barang Terampil	Sekretariat Bawaslu Kab. Gorontalo
40	1990061520250520 03	Maryanti Y. Mohu	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Kab. Gorontalo
41	1995012820250510 02	Valid Suleman	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Gorontalo
42	1993020720250520 02	Irawaty Siska	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Kab. Gorontalo Utara
43	1997041020250520 03	Medi Apriani Kadir	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Gorontalo Utara
44	1999122920250520 05	Regita Cahyani	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Gorontalo Utara

ANGKATAN IX

NO	NIP	NAMA	JABATAN	ASAL INSTANSI
1	1990051620250510 03	Armanto Yunus	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Pohuwato
2	1993091320250510 03	Ahmad Mohamad	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Pohuwato
3	1990021920250510 02	Ahmad Manueke	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Pohuwato
4	1993020520250520 03	Inggar Ajeng Pradina Riyanto	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kota Gorontalo
5	1999082120250520 02	Dewanti Salma Wulan	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kota Gorontalo
6	2000120420250520 06	Wahyuni Ramadani	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kota Gorontalo
7	1996102420250610 10	Hagie Randa	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Kab. Kerinci
8	2001112120250510 02	Triadi Setia Putra	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi
9	1992060120250510 01	Yanda Yomansyah	Penata Laksana Barang Terampil	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi
10	1999092720250510 03	Gilang Mulya Rizal	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi
11	1995102720250520 03	Zihan Zikriyan Jusraini	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi
12	2001081320250510 03	Muhammad Ikrom Habibi	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi

13	199606052025052006	Warsih	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Kab. Batanghari
14	200007132025052001	Intan Nurjannah	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Batanghari
15	200209142025052002	Rekha Herlisna	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Batanghari
16	199407192025051001	Muhammad Abdul Azziz	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Kab. Bungo
17	199706112025052004	Iga Sukma Devi	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Bungo
18	199101292025051001	Bayu Purnomo	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Bungo
19	200103312025052007	Thesa Putri. W	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Kerinci
20	199711232025051002	Husni Kurniawan Widy	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Kerinci
21	199403072025052001	Suci Ariska	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Kab. Merangin
22	199508012025051004	Muhammad Hari Wibowo Redy	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Merangin
23	199709242025052003	Ervina Devi	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Merangin
24	200303112025052001	Putri Fadhila	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Kab. Muaro Jambi
25	199408022025051001	Gevin Heri Putra	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Muaro Jambi
26	200001132025052004	Sarah Bethary	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Muaro Jambi
27	199907132025052005	Alya Maharani	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Sarolangun
28	199812102025051004	Muhammad Fazran Fadilah	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Sarolangun
29	199604042025052003	Tria Fatwa Yunita	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Sarolangun
30	200001212025052005	Rohmah Azizah	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Kab. Tanjung Jabung Barat
31	199902022025052005	Saprisa	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Tanjung Jabung

				Barat
32	199002212025052001	Gita Pramita Virginia Marsabessy	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Tanjung Jabung Barat
33	199509102025052002	Cahyani Arum Pangesti	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Kab. Tebo
34	200003252025051004	Muhammad Fadel Aziz	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Tebo
35	200106092025052008	Maulidhea Vasa	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Tebo
36	200209202025052003	Puji Rahayu	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur
37	200108202025051003	Muhammad Nabil	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur
38	199406012025052004	Anissa Safira Hidayat	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur
39	199909142025052004	Tamiya Gustriani Putri	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Kota Jambi
40	200207242025052003	Kiki Anggela Sari	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kota Jambi
41	199711032025051001	Danang Noprianto	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kota Jambi
42	199607152025051002	Verola Rakasiwi	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kota Sungai Penuh
43	200205082025051003	Kehananditi Adzin Abrar Taqy	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kota Sungai Penuh
44	200108282025051001	Akbar Junaidi	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kota Sungai Penuh

ANGKATAN X

NO	NIP	NAMA	JABATAN	ASAL INSTANSI
1	199405282025051003	Egit Priatim	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Kab. Cirebon

2	198910012025052002	Ratu Oktarina Triastuty	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat
3	200301312025051002	Fathan Arya Wijaya Kusumah	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat
4	199510242025051004	A Resta Anggara S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat
5	199709182025051004	Dikki Apriyanto	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat
6	200010292025052007	Yuni Rusmiati	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Kab. Bandung Barat
7	200007272025052003	Selvi Nurmayanti	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Bandung Barat
8	199604282025052004	Ludia Sapitri	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Bandung Barat
9	199707232025052003	Intansani Indah Nurrochmah	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Kab. Bekasi
10	199704072025052001	Yeni Royani	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Bekasi
11	199905232025052006	Rifka Ade Harfiyanti	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Bekasi
12	200004212025052006	Rezki Dwi Kartini Sukria	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Bogor
13	200005302025051004	Wijaya Fadhill Pratama	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Bogor
14	199301032025051003	Rikzansyah	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Bogor
15	200011142025052005	Novita Cahya Brilliantini	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Ciamis
16	199906142025052006	Ajeng Sri Wahyuni	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Ciamis
17	199907062025052005	Ristia Nurul Riyani	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Ciamis
18	199501292025052001	Ruri Putri Dee Indah Pawestie	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Cirebon
19	199312272025052002	Hervinda Fran's	Penata Kelola	Sekretariat Bawaslu

	04	Denti	Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Kab. Cirebon
20	1995012220250510 01	Angga Dwi Nugraha	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Garut
21	2000072420250510 01	Malsal Jajuli Haerudin Hermawan	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Garut
22	1999060820250520 04	Theresa Riska Yunita	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Garut
23	2001101720250510 03	Adi Wiguna Setiawan	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Kab. Indramayu
24	1999093020250520 03	Cynitiya Scandi Sant	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Indramayu
25	1994081520250510 02	Gian Firmansyah	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Indramayu
26	2001032320250510 06	Najib Nashrulloh	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Kab. Kuningan
27	1999030720250510 04	Muhammad Prayudo Hadi	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Kuningan
28	1996071420250510 04	Yoga Mahendra	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Kuningan
29	1996042720250520 03	Estu Ghita Wahyuningsih	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Majalengka
30	2002072520250520 04	Pipin Alpiah	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Majalengka
31	1999090720250510 02	Qira'ah Hafizhullah Syafra Maidin	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Majalengka
32	1992070720250510 02	Muhammad Zainal Abidin	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Kab. Pangandaran
33	2001051520250510 03	Zidan Ali Nurdiansyah	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Pangandaran
34	2000120220250510 03	Datep Ramdhani	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Pangandaran
35	1997072320250520 02	Desi Grasella Sitanggang	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Kab. Purwakarta
36	1996110320250520 02	Vicky Mutia	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Purwakarta
37	1999030720250510 03	Fuad Zen	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Purwakarta
38	1999011420250510	Rivaldhi Al Banie	Analisis Pengelolaan	Sekretariat Bawaslu

	03		Kuangan APBN Ahli Pertama	Kab. Subang
39	2000111820250510 04	Alvin Hermawan	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Subang
40	2000112920250510 05	Darren	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Subang
41	1996011820250510 03	Riky Rustiawan	Analisis Pengelolaan Kuangan APBN Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Sukabumi
42	1999123120250520 05	Selsa Ajeng Pradila	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Sukabumi
43	1998060320250510 05	Muhammad Fikri Fauzi	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Sukabumi
44	1993122220250520 01	Inten Diani Putri	Penata Laksana Barang Terampil	Sekretariat Bawaslu Kab. Sumedang

ANGKATAN XI

NO	NIP	NAMA	JABATAN	ASAL INSTANSI
1	1993121020250520 01	Siti Antika	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Sumedang
2	1996072420250520 02	Annisaa Nur Balqish	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Sumedang
3	1996061820250520 01	Tri Asmi	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bandung
4	1992042120250510 04	Agy Afryzal Yaomul Faruk	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bandung
5	2000091920250520 03	Estu Zahra Fuadah	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bandung
6	2001052620250520 01	Laura Elisa Br Malau	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cianjur
7	2002052520250510 01	Mulyana Saprudin	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cianjur
8	2000100620250520 08	Alma Nur Okta Delfina	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cianjur
9	1998112120250510 02	Muhamad Nauval Arief	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karawang
10	2000120720250510 05	Dikky Ramana Putra	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karawang
11	1999110920250510 04	Muhammad Alfath Fadli	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karawang

12	199208302025051001	Dani Muldiana	Penata Laksana Barang Terampil	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya
13	199801282025051003	Hendi Kurnia	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya
14	200107272025052007	Silfa Fadlilatunnisa	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya
15	200110032025051005	Muhammad Reinanta Pragesta	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Kota Bandung
16	199412122025052004	Kristin Tampubolon	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kota Bandung
17	199606152025051004	Farhan Adhitia Warman	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kota Bandung
18	199511192025052002	Isnaeni Fauziyah Ambarsari	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Kota Banjar
19	200002082025051002	Andre Junaedi	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kota Banjar
20	198909182025051002	Yosef Nursyamsi	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kota Banjar
21	200102222025052005	Ananda Salsabilah Jumawan	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Kota Bekasi
22	199602242025051001	Boy Candra	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kota Bekasi
23	199706272025051003	Nur Muhammad Nashrullah	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kota Bekasi
24	200206102025052004	Resty Amalia Salim	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Kota Bogor
25	199908222025052005	Lita Lestari	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kota Bogor
26	199612062025051003	Muhammad Andes Rojabi	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kota Bogor
27	200112062025052005	Adisti Nurul Fitri	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Kota Cimahi
28	200105212025051007	Nicholas Abelardo Melfiandy	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kota Cimahi
29	200204102025051002	Agam Zuama	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kota Cimahi
30	199404092025052003	Laras Priliani	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Kota Cirebon
31	199107282025051002	Endang Ismatullah	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kota Cirebon

32	200012132025052001	Nadinta Zulfa	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kota Cirebon
33	199209212025051003	Arief Rahman Hakim	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Kota Depok
34	199903302025052003	Salsabilla Qw	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kota Depok
35	199310302025052003	Ririn Dienatul Karimah	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kota Depok
36	199203132025052001	Lenny Mariaty Napitupulu	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Kota Sukabumi
37	200103282025052003	Yopani Selia Almahisa	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kota Sukabumi
38	199708282025052001	Githa Suci Purwadi Putri	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kota Sukabumi
39	200009112025052005	Dinda Ainun Syarah	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Kota Tasikmalaya
40	199503032025051002	Ryan Amanda Fitra	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kota Tasikmalaya
41	200108042025051003	Muhammad Rausan Fikry	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kota Tasikmalaya
42	199908012025051003	Agung Priyanto	Penata Laksana Barang Terampil	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
43	199709152025052004	Dita Fadilla Rahmi	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
44	199605312025052002	Yeni	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

ANGKATAN XII

NO	NIP	NAMA	JABATAN	ASAL INSTANSI
1	199804202025051003	Muh Ilvi Rizaini	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
2	199809092025052004	Nadilla Evi Rahmadani	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
3	200002162025051001	Azis Hafid Albuchori	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Banjarnegara
4	199502102025051002	Anda Arsyad Anwari	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Banjarnegara
5	1992050620250520	Galuh Tia Fasya	Penata Kelola	Sekretariat Bawaslu

	03		Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Kab. Banjarnegara
6	198911052025052004	Kushartiwi	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Kab. Banyumas
7	199409282025051001	Nasheer Sofwan Al Rasyid	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Banyumas
8	200109222025052006	Norma Risca Pratiwi	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Banyumas
9	200303292025052001	Hidayah Helmayani	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Kab. Batang
10	199403142025052002	Fadhilah Riayati	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Batang
11	199508142025051003	Bagus Rahmadika	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Batang
12	199103092025052002	Rika Reni Susanti	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Kab. Blora
13	199010292025051002	Dani Setyo Wibowo	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Blora
14	200202022025052003	Siti Fatimah	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Blora
15	200105022025052003	Windriana Diska Ananda	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Kab. Boyolali
16	199609072025052004	Zannurul Iswara	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Boyolali
17	200203072025052005	Martina Novalia	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Boyolali
18	200005052025052004	Murinah Nur Awalina	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Kab. Brebes
19	199412152025052003	Imanda Yustin Natalise	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Brebes
20	200109052025052003	Prisa Ratna Andriyani	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Brebes
21	199612252025052003	Hartini Devi Triana	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Kab. Cilacap
22	200011032025052003	Karima Resta Fadhila	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Cilacap
23	199211082025052002	Arofingtyas Aulianisa	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Cilacap
24	199910192025052002	Adna Nurtantina	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Kab. Grobogan
25	199810252025052002	Lilis Dwi Oktavia	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Grobogan

	05		Pertama	Kab. Grobogan
26	199206142025051001	Bayu Ukhta Albab	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Grobogan
27	200107102025052002	Muhimmatun Nisa'	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Kab. Jepara
28	199501132025051003	Ghani Rizky Muhammad	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Jepara
29	199306042025051001	Ahmad Andredy Kurniawan	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Jepara
30	200108092025052004	Indah Kurnia Wati	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Kab. Karanganyar
31	199506252025052006	Cempaka Widowati	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Karanganyar
32	199009232025052001	Risma Dewi Amanah	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Karanganyar
33	199510142025052003	Nunik Dwiarti	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Kab. Kebumen
34	199405222025051004	Ahmad Nur Baihaqi Sufhan	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Kebumen
35	199602142025051004	Insan Cahyadi	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Kebumen
36	199602192025052003	Wismasari Damardini	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Kab. Klaten
37	199704152025052002	Mira Wulandari	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Klaten
38	199206292025052003	Yasinta Fauziah Novitasari	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Klaten
39	199408242025052003	Maria Agustina Manik	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Kudus
40	200106212025052002	Auliana Ainul Muna	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Kudus
41	198911012025051001	Ady Abdul Chakim	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Kudus
42	199509202025052003	Cynthia Sarwo Indah	Pranata Keuangan APBN Terampil	Sekretariat Bawaslu Kab. Magelang
43	199811052025052003	Dwi Yustika Putri	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kab. Magelang
44	200111222025052003	Fadila Ayulistya	Penata Kelola Pengawasan	Sekretariat Bawaslu Kab. Magelang

			Pemilihan Umum Ahli Pertama	
--	--	--	--------------------------------	--

Nomor : B-107/KP.06/SJ/01/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Program Pelatihan
Pusdiklat Anggaran dan
Perbendaharaan Tahun 2026

Jakarta, 13 Januari 2026

Kepada Yth.

1. Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi Seluruh Indonesia

2. Kepala/Koordinator Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

Di

Tempat

Sehubungan dengan Surat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1/PP.3/2026 tertanggal 6 Januari 2026, Hal Program Pembelajaran bagi Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (KLDI) Tahun 2026, serta dalam rangka pemenuhan kebutuhan standarisasi kompetensi bagi pengelola keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan (AP), Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan menyelenggarakan Program terkait sertifikasi/penilaian kompetensi pejabat perbendaharaan, yang terdiri dari:
 - a. Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - b. *E-Learning* Bendahara Penerimaan;
 - c. Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - d. Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
2. Program pembelajaran sebagaimana dimaksud di atas, diselenggarakan secara *synchronous* dan *asynchronous*, sebagai berikut:
 - a. sesi *synchronous* diselenggarakan menggunakan perangkat aplikasi *virtual meeting*;
 - b. sesi *asynchronous* menggunakan aplikasi Kemenkeu *Learning Center* (KLC) atau aplikasi komputer lainnya; dan
 - c. Penyelenggaraan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Keuangan (BDK) menggunakan program pembelajaran dan pengajar/fasilitator yang telah distandardisasi dengan penyelenggaraan pembelajaran di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan.
3. Jadwal program pelatihan terkait sertifikasi/penilaian kompetensi pejabat perbendaharaan Tahun 2026 sebagaimana terlampir;
4. Tata cara dan informasi terkait pelaksanaan program pelatihan terkait sertifikasi/penilaian kompetensi pejabat perbendaharaan adalah sebagai berikut:
 - a. pendaftaran peserta PJJ Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, *E-Learning* Bendahara Penerimaan, PJJ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PJJ Pejabat Penandatanganan Surat perintah Membayar (PPSPM) melalui aplikasi SIMASPATEN yang dikelola oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan dengan tautan <https://simaspaten.kemenkeu.go.id>;
 - b. pendaftaran peserta untuk program pembelajaran selain poin 4a, dapat dilakukan melalui tautan formulir elektronik yang dikelola oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan dengan tautan <http://bit.ly/SWIPe-AP>;

- c. seleksi peserta akan mempertimbangkan beberapa kriteria seperti antrian pendaftar dan data ketersediaan pegawai pada satker pendaftar yang telah memiliki sertifikat kompetensi; dan
 - d. tata cara penugasan peserta mengikuti pelatihan sesuai dengan prosedur yang berlaku pada KLDI masing-masing.
5. Berkenaan dengan hal di atas, terkait penugasan pejabat/pegawai yang akan mengikuti program pembelajaran dimaksud, dengan memperhatikan:
 - a. ketersediaan pejabat/pegawai yang sebelumnya telah mengikuti pelatihan dan/atau memiliki sertifikat kompetensi dalam penugasan mengikuti pelatihan terkait sertifikasi kompetensi pejabat perbendaharaan sehingga pemanfaatan pelatihan dapat lebih optimal;
 - b. mendorong pejabat perbendaharaan aktif (sedang menjabat) yang belum mengikuti pelatihan dan/atau belum memiliki sertifikat kompetensi untuk dapat mengikuti pelatihan; dan
 - c. mengutamakan pejabat/pegawai yang telah memiliki sertifikat kompetensi untuk ditugaskan sebagai pejabat perbendaharaan;
6. Bagi pemegang sertifikat BNT, PNT, dan SNT, terutama yang akan memasuki masa kadaluwarsa, perlu didorong untuk mengikuti Program Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) Bendahara Pengeluaran/BPP, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) yang diselenggarakan dengan pola pembelajaran *open access* KLC Kementerian Keuangan melalui tautan <http://klc2.kemenkeu.go.id>. Adapun usulan perpanjangan masa berlaku Sertifikat Kompetensi diterima oleh KPPN paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
7. Kepada seluruh Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi agar mengkoordinir pejabat/pegawai di seluruh wilayah kabupaten/kotanya yang akan mengikuti pelatihan, serta membuat Surat Tugas bagi nama-nama usulan peserta pelatihan dan mengirimkan Surat Tugas yang sudah ditandatangani tersebut ke Puslitbangdiklat melalui tautan: <https://forms.gle/dNc7tV6epUAeBCbq7>.

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

Sekretaris Jenderal,



Ferdinand Eskol Tiar Sirait



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN DAN
PERBENDAHARAAN

JALAN RAYA PUNCAK KM. 72 GADOG, MEGAMENDUNG, BOGOR 16770 TELEPON (0251) 8244771; FAKSIMILE (0251) 8245412; SITUS: www.bppk.kemenkeu.go.id

Nomor : S-1/PP.3/2026 6 Januari 2026
Sifat : Segera
Lampiran : Tiga Berkas
Hal : Program Pembelajaran bagi Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja
Perangkat Daerah/Institusi lainnya (KLDI) Tahun 2026

Yth. 1. Para Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi Pengelolaan Keuangan
2. Para Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi Pengelolaan/Pengembangan SDM
di lingkungan Kementerian/Lembaga sebagaimana Lampiran I

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan standardisasi kompetensi bagi para pengelola keuangan di lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (KLDI), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan telah menyiapkan program pelatihan bagi pengelola keuangan di lingkungan KLDI dengan rincian program, kuota peserta, dan rencana penjadwalan sebagaimana tercantum pada Lampiran II.
2. Pada kesempatan ini, kami sampaikan informasi program pelatihan terkait sertifikasi/penilaian kompetensi pejabat perbendaharaan sebagaimana tercantum pada Lampiran III dengan ikhtisar sebagai berikut:

No.	Nama Program	Peruntukan Pelatihan
a.	PJJ Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu	- Kelulusan pelatihan menjadi persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi/sertifikasi bagi pejabat perbendaharaan; - Uji kompetensi/sertifikasi merupakan satu-satunya mekanisme untuk memperoleh sertifikat BNT, PNT, dan SNT pada masa implementasi penuh sejak Januari 2026.
b.	E-Learning Bendahara Penerimaan	
c.	PJJ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	
d.	PJJ Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	

3. Program pembelajaran sebagaimana dimaksud di atas, diselenggarakan secara *synchronous* dan *asynchronous*, sebagai berikut:
 - a. sesi *synchronous* diselenggarakan menggunakan perangkat aplikasi *virtual meeting*;
 - b. sesi *asynchronous* menggunakan aplikasi *Kemenkeu Learning Center* (KLC) atau aplikasi komputer lainnya; dan
 - c. Penyelenggaraan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Keuangan (BDK) menggunakan program pembelajaran dan pengajar/fasilitator yang telah distandardisasi dengan penyelenggaraan pembelajaran di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan.
4. Tata cara dan informasi pendaftaran pelatihan sebagaimana dimaksud dapat kami informasikan sebagai berikut:

- a. pendaftaran peserta PJJ Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, E-Learning Bendahara Penerimaan, PJJ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PJJ Pejabat Penandatangan Surat perintah Membayar (PPSPM) melalui aplikasi SIMASPATEN yang dikelola oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan dengan tautan <https://simaspaten.kemenkeu.go.id>;
 - b. pendaftaran peserta untuk program pembelajaran selain poin 4a, dapat dilakukan melalui tautan formulir elektronik yang dikelola oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan dengan tautan <http://bit.ly/SWIPe-AP>;
 - c. seleksi peserta akan mempertimbangkan beberapa kriteria seperti antrian pendaftar dan data ketersediaan pegawai pada satker pendaftar yang telah memiliki sertifikat kompetensi; dan
 - d. tata cara penugasan peserta mengikuti pelatihan sesuai dengan prosedur yang berlaku pada KLDI masing-masing.
5. Berkenaan dengan hal di atas, kiranya Saudara dapat menyebarluaskan informasi dan/atau mengoordinasikan penugasan pejabat/pegawai di lingkungan Saudara untuk dapat mengikuti program pembelajaran dimaksud, dengan memperhatikan:
- a. ketersediaan pejabat/pegawai yang sebelumnya telah mengikuti pelatihan dan/atau memiliki sertifikat kompetensi dalam penugasan mengikuti pelatihan terkait sertifikasi kompetensi pejabat perbendaharaan sehingga pemanfaatan pelatihan dapat lebih optimal;
 - b. mendorong pejabat perbendaharaan aktif (sedang menjabat) yang belum mengikuti pelatihan dan/atau belum memiliki sertifikat kompetensi untuk dapat mengikuti pelatihan; dan
 - c. mengutamakan pejabat/pegawai yang telah memiliki sertifikat kompetensi untuk ditugaskan sebagai pejabat perbendaharaan;
6. Bagi pemegang sertifikat BNT, PNT, dan SNT, terutama yang akan memasuki masa kadaluwarsa, perlu didorong untuk mengikuti Program Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) Bendahara Pengeluaran/BPP, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) yang diselenggarakan dengan pola pembelajaran *open access* KLC Kementerian Keuangan melalui tautan klc2.kemenkeu.go.id. Adapun usulan perpanjangan masa berlaku Sertifikat Kompetensi diterima oleh KPPN paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
7. Informasi terkait program pembelajaran pada kategori lainnya akan kami sampaikan pada kesempatan selanjutnya.

Dengan semangat Bersinar Terang (Bersih, Amanah, Ramah, dan Tetap Cemerlang) Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan berkomitmen untuk mempertahankan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih

Kepala Pusat,



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman <https://satu.kemenkeu.go.id> atau unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>

DAFTAR TUJUAN SURAT

No.	Kementerian/Lembaga
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat
2.	Dewan Perwakilan Rakyat
3.	Badan Pemeriksa Keuangan
4.	Mahkamah Agung
5.	Kejaksaan Republik Indonesia
6.	Kementerian Sekretariat Negara
7.	Kementerian Dalam Negeri
8.	Kementerian Luar Negeri
9.	Kementerian Pertahanan a. UO Kementerian Pertahanan b. UO Markas Besar Tentara Nasional Indonesia c. UO Markas Besar TNI AD d. UO Markas Besar TNI AL e. UO Markas Besar TNI AU
10.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
11.	Kementerian Keuangan
12.	Kementerian Pertanian
13.	Kementerian Perindustrian
14.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
15.	Kementerian Perhubungan
16.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
17.	Kementerian Kesehatan
18.	Kementerian Agama
19.	Kementerian Ketenagakerjaan
20.	Kementerian Sosial
21.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
22.	Kementerian Kelautan dan Perikanan
23.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
24.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
25.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
26.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
27.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
28.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
29.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
30.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
31.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
32.	Badan Intelijen Negara
33.	Badan Siber dan Sandi Negara
34.	Dewan Ketahanan Nasional
35.	Badan Pusat Statistik
36.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
37.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Kementerian/Lembaga
38.	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
39.	Kementerian Komunikasi dan Informatika
40.	Kepolisian Negara Republik Indonesia
41.	Badan Pengawas Obat dan Makanan
42.	Lembaga Ketahanan Nasional
43.	Badan Koordinasi Penanaman Modal
44.	Badan Narkotika Nasional
45.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
46.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
47.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
48.	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
49.	Komisi Pemilihan Umum
50.	Mahkamah Konstitusi RI
51.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
52.	Badan Informasi Geospasial
53.	Badan Standardisasi Nasional
54.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
55.	Lembaga Administrasi Negara
56.	Arsip Nasional Republik Indonesia
57.	Badan Kepegawaian Negara
58.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
59.	Kementerian Perdagangan
60.	Kementerian Pemuda dan Olah Raga
61.	Komisi Pemberantasan Korupsi
62.	Dewan Perwakilan Daerah
63.	Komisi Yudisial RI
64.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
65.	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
66.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
67.	Badan Sar Nasional
68.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
69.	Ombudsman Republik Indonesia
70.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
71.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
72.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
73.	Sekretariat Kabinet
74.	Badan Pengawas Pemilihan Umum
75.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
76.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
77.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
78.	Badan Keamanan Laut
79.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
80.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
81.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
82.	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
83.	Badan Pangan Nasional (Bapanas)

No.	Kementerian/Lembaga
84.	Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)
85.	Badan Karantina Indonesia
86.	Badan Gizi Nasional

Kepala Pusat,



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman <https://satu.kemenkeu.go.id> atau unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>

**RENCANA JADWAL PELATIHAN
 BAGI KEMENTERIAN/LEMBAGA/SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI LAINNYA (KLDI)
 TAHUN 2026**

1. Pelatihan Jarak Jauh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

Lokasi	Waktu Penyelenggaraan dan Rencana Peserta																				Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Pusdiklat AP	70		50																		120
BDK Medan		50	50		50	50		50		50	50		50		50		50	50		50	600
BDK Pekanbaru		50		50		50	50	50	50		50	50			50	50		50		50	600
BDK Palembang		50	50		50		20	50	50	50		50	50	50			50		50		570
BDK Cimahi	50		50	50	50	50			50		20		50		50	50		50		50	570
BDK Yogyakarta	50			50		50	50		50	50	50		50		50	50	20		50		570
BDK Malang		50	50		50		50	50	50			50	50	20		50		50		50	570
BDK Pontianak	50	50		50		50		50		50	50	50			50		50	50	50		600
BDK Balikpapan		50		50	50		50		50	50	50		50	50		50	50			50	600
BDK Denpasar		50	50		50	50		50		50		50	50		50			50	50		550
BDK Makassar	50		50		50		50	50	50			50		50	50	50	50	50		50	650
BDK Manado		50			50	50	50			50	50		50	50		50	50	50		50	600
Total Rencana Peserta																					6.600

No.	Waktu Penyelenggaraan		No.	Waktu Penyelenggaraan	
	Mulai	Selesai		Mulai	Selesai
1.	26 Januari 2026	02 Februari 2026	11.	20 Juli 2026	27 Juli 2026
2.	09 Februari 2026	16 Februari 2026	12.	03 Agustus 2026	10 Agustus 2026
3.	23 Februari 2026	02 Maret 2026	13.	24 Agustus 2026	01 September 2026
4.	06 April 2026	13 April 2026	14.	07 September 2026	14 September 2026
5.	20 April 2026	27 April 2026	15.	21 September 2026	28 September 2026
6.	04 Mei 2026	11 Mei 2026	16.	05 Oktober 2026	12 Oktober 2026
7.	18 Mei 2026	25 Mei 2026	17.	19 Oktober 2026	26 Oktober 2026
8.	08 Juni 2026	15 Juni 2026	18.	02 November 2026	09 November 2026
9.	22 Juni 2026	29 Juni 2026	19.	16 November 2026	23 November 2026
10.	06 Juli 2026	13 Juli 2026	20.	23 November 2026	30 November 2026

2. E-Learning Bendahara Penerimaan

No.	Waktu Penyelenggaraan		Rencana Peserta	Penyelenggara
	Mulai	Selesai		
1.	09 Februari 2026	13 Februari 2026	100	Pusdiklat AP
2.	18 Mei 2026	22 Mei 2026	200	Pusdiklat AP
3.	07 September 2026	11 September 2026	200	Pusdiklat AP
4.	09 Februari 2026	13 Februari 2026	100	BDK Medan
5.	02 Maret 2026	06 Maret 2026	100	BDK Pekanbaru
6.	20 April 2026	24 April 2026	100	BDK Palembang
7.	18 Mei 2026	22 Mei 2026	100	BDK Cimahi
8.	22 Juni 2026	26 Juni 2026	100	BDK Yogyakarta
9.	13 Juli 2026	17 Juli 2026	100	BDK Malang
10.	26 Agustus 2026	01 September 2026	100	BDK Pontianak
11.	07 September 2026	11 September 2026	100	BDK Balikpapan
12.	12 Oktober 2026	16 Oktober 2026	100	BDK Denpasar
13.	16 November 2026	20 November 2026	100	BDK Makassar
14.	16 November 2026	20 November 2026	100	BDK Manado
Total Rencana Peserta			1.600	

3. Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Pembuat Komitmen

Lokasi	Waktu Penyelenggaraan dan Rencana Peserta																										Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Pusdiklat AP		100	100		100	100	150	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150	150	150	150	2.850
BDK Medan	50					50				50			50								50				50		300
BDK Pekanbaru			50					50			50			50			50							50			300
BDK Palembang			50						50				50							50	50		50				300
BDK Cimahi		50				50				50							50								50		250
BDK Yogyakarta			50					50							50								50			50	250
BDK Malang	50						50				50		50							50							250
BDK Pontianak				50		50				50					50				50		50						300
BDK Balikpapan			50						50	50	50				50					50					50		350
BDK Denpasar	50					50								50					50							50	250

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lokasi	Waktu Penyelenggaraan dan Rencana Peserta																										Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
BDK Makassar			50				50						50		30			50					50				300
BDK Manado	50						50				50	50								50					50		300
Total Rencana Peserta																											6.000

No.	Waktu Penyelenggaraan		No.	Waktu Penyelenggaraan	
	Mulai	Selesai		Mulai	Selesai
1.	27 Januari 2026	02 Februari 2026	14.	14 Juli 2026	20 Juli 2026
2.	10 Februari 2026	16 Februari 2026	15.	28 Juli 2026	04 Agustus 2026
3.	18 Februari 2026	24 Februari 2026	16.	04 Agustus 2026	10 Agustus 2026
4.	24 Februari 2026	02 Maret 2026	17.	11 Agustus 2026	18 Agustus 2026
5.	03 Maret 2026	09 Maret 2026	18.	24 Agustus 2026	31 Agustus 2026
6.	30 Maret 2026	06 April 2026	19.	08 September 2026	14 September 2026
7.	07 April 2026	13 April 2026	20.	22 September 2026	28 September 2026
8.	21 April 2026	27 April 2026	21.	06 Oktober 2026	12 Oktober 2026
9.	05 Mei 2026	12 Mei 2026	22.	20 Oktober 2026	26 Oktober 2026
10.	19 Mei 2026	25 Mei 2026	23.	27 Oktober 2026	02 November 2026
11.	02 Juni 2026	08 Juni 2026	24.	03 November 2026	09 November 2026
12.	09 Juni 2026	15 Juni 2026	25.	17 November 2026	23 November 2026
13.	30 Juni 2026	06 Juli 2026	26.	24 November 2026	30 November 2026

4. Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)

Lokasi	Waktu Penyelenggaraan dan Rencana Peserta																				Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Pusdiklat AP			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		50	50	50	50	50	850
BDK Medan			50		50				50		50					50			50		300
BDK Pekanbaru				50	50					50		50		50			50				300
BDK Palembang		50			50							50	50			50		50			300
BDK Cimahi	50							50			50	50					50				250
BDK Yogyakarta				50				50		50			50							50	250
BDK Malang				50		50					50			50				50			250
BDK Pontianak			50		50						50				50			50		50	300
BDK Balikpapan		50		50				50		50			50			50					300
BDK Denpasar		50			50								50	50					50		250
BDK Makassar				50		50					50		50					50		50	300
BDK Manado		50			50				50			50	50				50		50		350
Total Rencana Peserta																					4.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Waktu Penyelenggaraan		No.	Waktu Penyelenggaraan	
	Mulai	Selesai		Mulai	Selesai
1.	26 Januari 2026	02 Februari 2026	11.	13 Juli 2026	20 Juli 2026
2.	02 Februari 2026	09 Februari 2026	12.	27 Juli 2026	03 Agustus 2026
3.	23 Februari 2026	02 Maret 2026	13.	10 Agustus 2026	18 Agustus 2026
4.	02 Maret 2026	09 Maret 2026	14.	31 Agustus 2026	07 September 2026
5.	13 April 2026	20 April 2026	15.	07 September 2026	14 September 2026
6.	04 Mei 2026	11 Mei 2026	16.	14 September 2026	21 September 2026
7.	18 Mei 2026	25 Mei 2026	17.	28 September 2026	05 Oktober 2026
8.	08 Juni 2026	15 Juni 2026	18.	12 Oktober 2026	19 Oktober 2026
9.	22 Juni 2026	29 Juni 2026	19.	26 Oktober 2026	02 November 2026
10.	29 Juni 2026	06 Juli 2026	20.	09 November 2026	16 November 2026

5. E-Learning Pembekalan dan Sertifikasi Penyusun RKA

No.	Waktu Penyelenggaraan		Rencana Peserta
	Mulai	Selesai	
1.	06 Februari 2026	12 Februari 2026	600
2.	27 Februari 2026	05 Maret 2026	600
3.	10 April 2026	16 April 2026	600
4.	30 April 2026	07 Mei 2026	600
5.	19 Juni 2026	25 Juni 2026	600
6.	03 Juli 2026	09 Juli 2026	600
7.	07 Agustus 2026	13 Juli 2026	600
8.	04 September 2026	10 September 2026	600
9.	09 Oktober 2026	15 Oktober 2026	600
10.	30 Oktober 2026	05 November 2026	600
Total Rencana Peserta			6.000

6. E-Learning Pembekalan dan Sertifikasi Penyusun RKA Level Manajerial

No.	Waktu Penyelenggaraan		Rencana Peserta	Penyelenggara
	Mulai	Selesai		
1.	18 Februari 2026	20 Februari 2026	300	Pusdiklat AP
2.	09 Maret 2026	11 Maret 2026	300	Pusdiklat AP
3.	30 Maret 2026	01 April 2026	400	Pusdiklat AP
4.	11 Mei 2026	13 Mei 2026	400	Pusdiklat AP
5.	08 Juni 2026	10 Juni 2026	400	Pusdiklat AP
6.	20 Juli 2026	22 Juli 2026	400	Pusdiklat AP
7.	26 Agustus 2026	28 Agustus 2026	400	Pusdiklat AP
8.	21 September 2026	23 September 2026	400	Pusdiklat AP
9.	05 Oktober 2026	07 Oktober 2026	400	Pusdiklat AP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Waktu Penyelenggaraan		Rencana Peserta	Penyelenggara
	Mulai	Selesai		
10.	09 November 2026	11 November 2026	400	Pusdiklat AP
11.	18 Februari 2026	20 Februari 2026	100	BDK Medan
12.	18 Mei 2026	20 Mei 2026	100	BDK Medan
13.	23 Februari 2026	25 Februari 2026	100	BDK Pekanbaru
14.	08 Juni 2026	10 Juni 2026	100	BDK Pekanbaru
15.	30 Maret 2026	01 April 2026	100	BDK Palembang
16.	29 Juni 2026	01 Juli 2026	100	BDK Palembang
17.	13 April 2026	15 April 2026	100	BDK Cimahi
18.	20 Juli 2026	22 Juli 2026	100	BDK Cimahi
19.	27 April 2026	29 April 2026	100	BDK Yogyakarta
20.	10 Agustus 2026	12 Agustus 2026	100	BDK Yogyakarta
21.	11 Mei 2026	13 Mei 2026	100	BDK Malang
22.	26 Agustus 2026	28 Agustus 2026	100	BDK Malang
23.	18 Februari 2026	20 Februari 2026	100	BDK Pontianak
24.	06 Mei 2026	08 Mei 2026	100	BDK Pontianak
25.	23 Februari 2026	25 Februari 2026	100	BDK Balikpapan
26.	08 Juni 2026	10 Juni 2026	100	BDK Balikpapan
27.	30 Maret 2026	01 April 2026	100	BDK Denpasar
28.	29 Juni 2026	01 Juli 2026	100	BDK Denpasar
29.	13 April 2026	15 April 2026	100	BDK Makassar
30.	20 Juli 2026	22 Juli 2026	100	BDK Makassar
31.	1 Juni 2026	3 Juni 2026	100	BDK Manado
32.	10 Agustus 2026	12 Agustus 2026	100	BDK Manado
Total Rencana Peserta			6.000	

7. E-Learning Pembekalan dan Sertifikasi Penyusun RKA Level Eksekutif

No.	Waktu Penyelenggaraan		Rencana Peserta
	Mulai	Selesai	
1.	21 September 2026	25 September 2026	100
Total Rencana Peserta			100

8. E-Learning Analisis Dasar Penganggaran

No.	Waktu Penyelenggaraan		Rencana Peserta
	Mulai	Selesai	
1.	20 April 2026	24 April 2026	100
2.	18 Mei 2026	22 Mei 2026	100
Total Rencana Peserta			200

9. Pelatihan Jarak Jauh Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

No.	Waktu Penyelenggaraan		Rencana Peserta
	Mulai	Selesai	
1.	27 April 2026	30 April 2026	100
Total Rencana Peserta			100

10. Pelatihan Jarak Jauh Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

No.	Waktu Penyelenggaraan		Rencana Peserta
	Mulai	Selesai	
1.	06 Juli 2026	10 Juli 2026	100
Total Rencana Peserta			100

11. E-Learning Dewan Pengawas BLU

No.	Waktu Penyelenggaraan		Rencana Peserta
	Mulai	Selesai	
1.	03 Agustus 2026	14 Agustus 2026	250
Total Rencana Peserta			250

*) dalam hal terdapat perubahan waktu penyelenggaraan dan penambahan program pelatihan akan kami informasikan pada kesempatan pertama

Kepala Pusat,



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman <https://satu.kemenkeu.go.id> atau unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>

Lampiran III
 Surat Kepala Pusdiklat Anggaran dan
 Perbendaharaan
 Nomor : S-1/PP.3/2026
 Tanggal : 6 Januari 2026

**DAFTAR PROGRAM PEMBELAJARAN BAGI KEMENTERIAN/LEMBAGA/SATUANKERJA
 PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI LAINNYA (KLDI) TAHUN 2026**

No	Program Pelatihan	Kuota peserta	Kategori
1.	Pelatihan Jarak Jauh Bendahara Pengeluaran/Bendaharan Pengeluaran Pembantu	6.600	Terkait Sertifikasi BNT
2.	E-Learning Bendahara Penerimaan	1.600	
3.	Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Pembuat Komitmen	6.000	Terkait Sertifikasi PNT
4.	Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	4.000	Terkait Sertifikasi SNT
5.	E-Learning Pembekalan dan Sertifikasi Penyusun RKA	6.000	Terkait Sertifikasi Kompetensi Penyusun RKA
6.	E-Learning Pembekalan dan Sertifikasi Penyusun RKA Level Manajerial	6.000	
7.	E-Learning Pembekalan dan Sertifikasi Penyusun RKA Level Eksekutif	100	
8.	E-Learning Analisis Dasar Penganggaran	200	Terkait Penguatan Kompetensi Tematis JFAA
9.	Pelatihan Jarak Jauh Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	100	Penguatan Peran Pengawasan dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara
10.	Pelatihan Jarak Jauh Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	100	
11.	E-Learning Dewan Pengawas BLU	250	Penguatan Pengelolaan Keuangan BLU

Kepala Pusat,



Ditandatangani secara elektronik
 Bhimantara Widyajala



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman <https://satu.kemenkeu.go.id> atau unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN DAN
PERBENDAHARAAN

JALAN RAYA PUNCAK KM. 72 GADOG, MEGAMENDUNG, BOGOR 16770 TELEPON (0251) 8244771; FAKSIMILE (0251) 8245412; SITUS: www.bppk.kemenkeu.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-56/PP.3/2026

TENTANG
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRATIF DAN PEMANGGILAN PESERTA
PELATIHAN JARAK JAUH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PERIODE 18 S.D. 24 FEBRUARI 2026

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Kementerian Keuangan Republik Indonesia, memberitahukan hal-hal sebagai berikut.

A. Ketentuan Umum

1. Pembelajaran Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Pembuat Komitmen Periode 18 s.d. 24 Februari 2026 diselenggarakan selama 5 (lima) hari kerja secara daring melalui Microsoft Teams Meeting/Zoom dari kantor/lokasi masing-masing. Jadwal pembelajaran tercantum pada lampiran pengumuman ini.
2. Nama-nama peserta Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Pembuat Komitmen Periode 18 s.d. 24 Februari 2026 sebagaimana tercantum pada lampiran pengumuman ini.
3. Persyaratan peserta sebagai berikut:
 - a. ASN/Prajurit TNI/Anggota Polri;
 - b. pangkat/golongan minimal bagi calon PPK adalah Penata Muda (III/a)/setara dan bagi PPK aktif adalah Pengatur Muda (II/a)/setara;
 - c. ditugaskan oleh pimpinan instansi masing-masing;
 - d. pendidikan minimal bagi calon PPK adalah setara D-III dan bagi PPK aktif adalah setara SMA.
4. Peserta akan mendapat Sertifikat apabila mengikuti seluruh pembelajaran *synchronous* tatap muka daring sesuai jadwal, mendapat **nilai ujian komprehensif minimal 65 (enam puluh lima)**, dan persyaratan lain yang berlaku.

B. Ketentuan Teknis Pelatihan Jarak Jauh

1. Peserta diwajibkan untuk bergabung ke dalam grup *Whatsapp* Pelatihan sesuai dengan kelas masing-masing. Pembagian dapat dilihat di dalam lampiran pengumuman ini. Khusus bagi peserta dengan unit penyelenggara Pusdiklat AP, tautan kelas grup *Whatsapp* dapat dilihat melalui <https://bit.ly/SWIPe-AP>
2. Panduan teknis dan informasi lebih lanjut terkait tautan undangan tatap muka daring melalui Zoom/Microsoft Teams Meeting, registrasi Simaspaten, dan jadwal pembelajaran akan dijelaskan melalui media grup *Whatsapp*.
3. Peserta melakukan registrasi data diri peserta pembelajaran secara mandiri pada aplikasi Simaspaten **selambat-lambatnya Rabu, 18 Februari 2026** melalui alamat <https://simaspaten.kemenkeu.go.id/>. Panduan tutorial akses Simaspaten dapat diakses di s.kemenkeu.go.id/manualsimaspaten2026 atau menghubungi KPPN setempat pada wilayah satuan kerja peserta yang bersangkutan.

4. Proses pembelajaran pelatihan jarak jauh dilaksanakan melalui metode *Synchronous* tatap muka daring dan metode *Synchronous* non tatap muka sebagai berikut:
 - a. ***Synchronous* tatap muka daring** dilaksanakan oleh peserta dan pengajar/fasilitator melalui Zoom/Microsoft Teams Meeting. Peserta wajib hadir sesuai jadwal. Saat mengikuti kegiatan tatap muka daring, maka yang tampil dalam akun peserta adalah peserta yang aktif mengikuti, bukan foto, atau tampilan lain. Tautan undangan akan disampaikan melalui grup Whatsapp;
 - b. ***Synchronous* nontatap muka** dilaksanakan oleh peserta dan pengajar/fasilitator melalui grup WhatsApp, quizziz/kahoot, atau media lainnya yang ditentukan oleh pengajar dan panitia. Peserta juga wajib mengerjakan penugasan yang diberikan oleh pengajar dan panitia.
5. Ketentuan pakaian selama mengikuti kegiatan pembelajaran sesi ***Synchronous* tatap muka daring** adalah:
 - a. pria, kemeja lengan panjang warna putih dan celana warna hitam serta berdasi warna gelap, atau sesuai aturan pakaian dinas di masing-masing kantor peserta;
 - b. wanita, kemeja/blouse lengan panjang warna putih dan/atau blazer/jas warna putih serta celana panjang/rok panjang/rok pendek warna hitam, atau sesuai aturan pakaian dinas di kantor peserta masing-masing.
6. Untuk kelancaran program pelatihan dimaksud, kami mohon bantuan kepada Pimpinan Unit peserta masing-masing untuk memberikan izin serta memantau pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti pelatihan ini.
7. Peserta dapat dinyatakan tidak berhak mengikuti kegiatan apabila ternyata tidak memberikan data sebenarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melanggar tata tertib pelatihan yang ada di buku panduan pelatihan.
8. Apabila ada penyimpangan atau pelanggaran kode etik oleh pegawai kami saat Saudara menerima layanan, Saudara dapat melaporkannya ke surel pengaduan.ap@kemenkeu.go.id dilengkapi alat bukti otentik. Identitas pelapor akan dijamin kerahasiaannya.

Dengan semangat Bersinar Terang (Bersih, Amanah, Ramah, dan Tetap Cemerlang) Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan berkomitmen mempertahankan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

Kami harap agar pengumuman ini ditindaklanjuti.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 12 Februari 2026
Kepala Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Anggaran dan
Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala



Tembusan:

1. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pekanbaru
2. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Palembang
3. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta
4. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Balikpapan
5. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Makassar
6. Kepala Biro Keuangan Kementerian/Lembaga (terlampir)
7. Kepala Biro SDM/Kepegawaian Kementerian/Lembaga (terlampir)
8. Kepala Pusdiklat Kementerian/Lembaga (terlampir)
9. Peserta yang bersangkutan

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT JENDERAL

- Yth. 1. Para Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi
2. Para Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota
3. Para Koordinator Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota

SURAT EDARAN
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA (PPPK) KURIKULUM PENGENALAN NILAI DAN ETIKA
INSTANSI TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU/PANWASLIH
PROVINSI DAN SEKRETARIAT BAWASLU/PANWASLIH KABUPATEN/KOTA

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan penyelenggaraan Orientasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Tahun 2026 di Lingkungan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota yang akan diselenggarakan oleh Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, sehingga perlu menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyelenggaraan Orientasi PPPK Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Tahun 2026 bagi Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Orientasi PPPK Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Tahun 2026 bagi Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi dengan tujuan sebagai berikut :

- Mengembangkan dedikasi dan komitmen yang kuat dari PPPK dalam rangka mengembangkan kinerjanya;
- Memberikan pengenalan tugas dan fungsi ASN;
- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai tentang kebijakan, prosedur, dan peraturan yang berlaku;
- Menanamkan nilai-nilai dasar kelembagaan dan etika di Bawaslu yang Mandiri, Integritas, Transparansi, Profesional, Akuntabilitas dan Kebersamaan;
- Meningkatkan motivasi dan komitmen PPPK Bawaslu dalam menjalankan tugas dengan baik.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini mencakup tahapan dan alur perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Orientasi PPPK Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Tahun 2026.

D. Dasar

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;
7. Peraturan LAN Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
8. Keputusan Kepala LAN Nomor 289/K.1/PDP.07/2022 Tentang Pedoman Orientasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

E. Isi Edaran

Dalam penyelenggaraan Orientasi PPPK Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Tahun 2026 di Lingkungan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi agar mempedomani pada Pedoman Penyelenggaraan Orientasi PPPK Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada Surat Edaran ini.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini agar diperhatikan dan dipedomani oleh Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi dalam Penyelenggaraan Orientasi PPPK Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Tahun 2026.

Demikian disampaikan agar Surat Edaran ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 4 Mei 2026

Sekretaris Jenderal,



Ferdinand Eskol Tiar Sirait

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bawaslu;
2. Para Anggota Bawaslu.

PEDOMAN PENYELENGGARAAN ORIENTASI PPPK

2026



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), merupakan unsur strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Dalam konteks penyelenggaraan pengawasan pemilu, keberadaan PPPK di lingkungan **Badan Pengawas Pemilihan Umum** memiliki peran penting dalam menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Seiring dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan tuntutan reformasi birokrasi, aparatur negara dituntut untuk memiliki pemahaman yang memadai mengenai nilai, etika, tata kelola organisasi, serta budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan pelayanan publik. Kebijakan pengelolaan ASN yang dikembangkan oleh **Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi** menegaskan pentingnya penguatan kompetensi, integritas, dan profesionalisme aparatur melalui berbagai program pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia.

Dalam rangka memastikan bahwa PPPK mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, diperlukan suatu program orientasi yang sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Program orientasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengenalan terhadap struktur organisasi dan tata kerja, tetapi juga sebagai media internalisasi nilai-nilai dasar ASN, etika profesi, serta komitmen terhadap visi dan misi organisasi.

Orientasi PPPK terdiri atas 2 (dua) Kurikulum, yaitu Kurikulum Pengenalan Tugas dan Fungsi ASN yang diselenggarakan menggunakan Sistem Pengembangan Kompetensi LAN RI (MOOC) dan Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah disusun sebagai instrumen pembelajaran yang komprehensif untuk membekali PPPK dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku kerja yang selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui kurikulum ini, diharapkan peserta mampu memahami peran strategisnya dalam mendukung kinerja organisasi, mengimplementasikan nilai BerAKHLAK, serta mengintegrasikan prinsip Bela Negara dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Dengan demikian, penyusunan pedoman orientasi ini menjadi langkah strategis dalam membangun kapasitas dan karakter PPPK yang profesional, berintegritas, serta berorientasi pada kinerja. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi unit kerja dalam menyelenggarakan kegiatan orientasi secara terencana, terukur, dan berkelanjutan, guna mendukung terwujudnya tata kelola pengawasan pemilu yang kredibel dan berkualitas.

B. Pengertian Umum

Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah merupakan pedoman pembelajaran yang disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program orientasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan **Badan Pengawas Pemilihan Umum**. Kurikulum ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman yang komprehensif mengenai struktur organisasi, tata kerja, jabatan, manajemen kinerja, serta penerapan nilai dan etika ASN dalam pelaksanaan tugas.

Orientasi PPPK melalui kurikulum ini merupakan bagian integral dari sistem pembinaan aparatur negara yang bertujuan membangun kompetensi, integritas, dan profesionalisme aparatur. Pelaksanaannya sejalan dengan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang ditetapkan oleh **Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**, yang menekankan pentingnya penguatan budaya kerja, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berkualitas.

Kurikulum ini memuat materi pembelajaran yang mencakup pengenalan organisasi, pemahaman jabatan, pengelolaan kinerja, serta internalisasi nilai BerAKHLAK dan Bela Negara. Seluruh materi disusun secara sistematis untuk mendukung proses adaptasi PPPK terhadap lingkungan kerja, tugas, dan tanggung jawab yang diemban.

Melalui pelaksanaan kurikulum ini, diharapkan PPPK memiliki kesamaan persepsi, pemahaman, dan komitmen dalam menjalankan peran sebagai aparatur negara yang profesional, berintegritas, serta berorientasi pada pencapaian kinerja organisasi. Kurikulum ini juga menjadi landasan dalam membentuk sikap dan perilaku kerja yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan kelembagaan.

BAB II

KURIKULUM

A. Struktur Kurikulum

Kurikulum dibuat untuk memberikan pemahaman mengenai Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah. Proses pembelajaran ini membekali Peserta dengan pengetahuan, sikap dan perilaku tentang nilai dan etika yang ada pada Instansinya sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan jabatannya dalam mendukung tercapainya visi dan misi dari organisasi.

B. Materi Orientasi

Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Agenda 1 : Pengenalan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- b. Agenda 2 : Pengenalan Jabatan
- c. Agenda 3 : Manajemen Kinerja Organisasi
- d. Agenda 4 : Kompetensi Teknis Administrasi Perkantoran
- e. Agenda 5 : Penerapan Fungsi dan Tugas ASN di Tempat Kerja

C. Ringkasan Materi

Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah

- a. Pengenalan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
 1. Deskripsi Singkat

Pelatihan ini membekali Peserta dengan pemahaman mengenai arah strategis, struktur lembaga, struktur organisasi dan tata kerja yang berlaku di lembaga.
 2. Hasil belajar

Setelah mengikuti pembelajaran, Peserta diharapkan memahami peran strategis, pola hubungan dan tata kerja antar unit di lembaga, dan sasaran rencana strategis lembaga.
 3. Indikator hasil belajar

Setelah mengikuti pembelajaran, peserta diharapkan dapat:

 - a) memahami kebijakan orientasi PPPK dan peran PPPK dalam organisasi;
 - b) memahami peran strategis PPPK dalam mendukung kinerja Bawaslu;
 - c) menunjukkan komitmen belajar dan etika ASN;
 - d) memahami arah strategis organisasi Bawaslu;
 - e) mampu mengaitkan peran PPPK dengan sasaran strategis Bawaslu;
 - f) memahami struktur organisasi dan fungsi unit kerja;
 - g) mampu menerapkan pola hubungan dan tata kerja.
 4. Materi pokok
 - a) kebijakan orientasi PPPK dan peran PPPK dalam organisasi;
 - b) peran strategis PPPK dalam mendukung kinerja Bawaslu;

- c) komitmen belajar dan etika ASN;
- d) arah strategis organisasi Bawaslu;
- e) peran PPPK dengan sasaran strategis Bawaslu;
- f) struktur organisasi dan fungsi unit kerja;
- g) pola hubungan dan tata kerja.

b. Pengenalan Jabatan

1. Deskripsi Singkat

Pelatihan ini membekali Peserta dengan pengetahuan tentang jabatan, tugas, tanggung jawab, kewenangan, serta peran PPPK yang berhubungan dengan tugas dan fungsi lembaga.

2. Hasil belajar

Setelah mengikuti pembelajaran, Peserta diharapkan mampu menghubungkan dan menerapkan tugas jabatannya di unit kerja.

3. Indikator hasil belajar

Setelah mengikuti pembelajaran, peserta diharapkan dapat:

- a) menjelaskan kedudukan dan jenis jabatan PPPK;
- b) memahami tugas dalam mendukung kinerja Bawaslu;
- c) menghubungkan tugas jabatan dengan fungsi unit kerja;
- d) menerapkan tugas dan jabatannya dalam konteks kerja.

4. Materi pokok

- a) kedudukan dan jenis jabatan PPPK;
- b) tugas dalam mendukung kinerja Bawaslu;
- c) tugas jabatan dengan fungsi unit kerja;
- d) tugas dan jabatannya dalam konteks kerja.

c. Manajemen Kinerja Organisasi

1. Deskripsi Singkat

Pelatihan ini membekali Peserta dengan pemahaman tentang manajemen kinerja organisasi di lingkungan lembaga.

2. Hasil belajar

Setelah mengikuti pembelajaran, Peserta diharapkan mampu menghubungkan dan memahami perencanaan kinerja serta mekanisme dan prinsip penilaian kinerja.

3. Indikator hasil belajar

Setelah mengikuti pembelajaran, peserta diharapkan dapat:

- a) memahami konsep dan siklus manajemen kinerja organisasi;
- b) memahami perencanaan kinerja individu dan unit kerja;
- c) mengaitkan perencanaan kinerja dengan tugas jabatan;
- d) memahami mekanisme dan prinsip penilaian kinerja.

4. Materi pokok

- a) konsep dan siklus manajemen kinerja organisasi;
- b) perencanaan kinerja individu dan unit kerja;
- c) perencanaan kinerja dengan tugas jabatan;

d) mekanisme dan prinsip penilaian kinerja.

d. Kompetensi Teknis Administrasi Perkantoran

1. Deskripsi singkat

Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan teknis peserta Orientasi PPPK dalam penggunaan aplikasi perkantoran yang menunjang pekerjaan administratif di lingkungan Bawaslu. Fokus diberikan pada optimalisasi penggunaan Microsoft Word untuk penyusunan laporan dan surat resmi, serta penggunaan Microsoft Excel dasar untuk pengolahan dan rekapitulasi data sederhana.

2. Hasil belajar

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat mengoperasikan fitur dasar aplikasi perkantoran.

3. Indikator hasil belajar

Setelah mengikuti pembelajaran, peserta diharapkan dapat:

- a) Peserta mampu mengoperasikan fitur dasar aplikasi perkantoran.
- b) Peserta mampu memahami jenis dan format surat dinas
- c) Peserta mampu menyusun naskah dinas sesuai standar regulasi Bawaslu.

4. Materi pokok

- a) *Basic Office Skills*
- b) Tata naskah dinas
- c) Penulisan surat dinas

e. Penerapan Fungsi dan Tugas ASN di Tempat Kerja

1. Deskripsi Singkat

Pelatihan ini membekali Peserta dengan pengetahuan tentang penerapan fungsi dan tugas ASN di tempat kerja.

2. Hasil belajar

Setelah mengikuti pembelajaran, Peserta diharapkan mampu menerapkan, mengimplementasikan dan menghubungkan nilai BerAKHLAK.

3. Indikator hasil belajar

Setelah mengikuti pembelajaran, peserta diharapkan dapat:

- a) menerapkan nilai BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas;
- b) memahami konsep dan nilai dasar Bela Negara;
- c) mengimplementasikan sikap Bela Negara dalam konteks kerja;
- d) mengaitkan Bela Negara dengan Peran ASN PPPK;
- e) menunjukkan peningkatan pemahaman materi orientasi;
- f) memberikan peningkatan pemahaman dan umpan balik terhadap penyelenggaraan orientasi.

4. Materi pokok

- a) nilai BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas;
- b) konsep dan nilai dasar Bela Negara;

- c) sikap Bela Negara dalam konteks kerja;
- d) sikap Bela Negara dengan Peran ASN PPPK;
- e) peningkatan pemahaman dan umpan balik penyelenggaraan orientasi.

D. Struktur Materi

Materi Orientasi PPPK Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah dilaksanakan minimal 50 (tiga puluh) JP yang dapat dilaksanakan melalui metode *blended-learning* dan/atau *distanced-learning*. Materi dan jumlah JP secara terperinci adalah sebagai berikut:

No	Agenda	JP
1.	Pengenalan Struktur Organisasi dan Tata Kerja	12 JP
a.	Kebijakan orientasi PPPK	1
b.	Peran strategis PPPK dalam mendukung kinerja Bawaslu	1
c.	Tata tertib, Komitmen belajar, Alur Pembelajaran	2
d.	Arah Rencana Strategis Bawaslu 2025-2030	2
e.	Peran PPPK dalam Rencana Strategis Bawaslu	2
f.	Struktur organisasi dan fungsi unit kerja	2
g.	Pola hubungan dan tata kerja	2
2.	Pengenalan Jabatan	7 JP
a.	Kedudukan dan jenis jabatan PPPK	2
b.	Tugas PPPK dalam mendukung kinerja Bawaslu	2
c.	Tugas jabatan PPPK dalam fungsi unit kerja	1
d.	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Jabatan PPPK	2
3.	Manajemen Kinerja Organisasi	7 JP
a.	Konsep dan siklus manajemen kinerja organisasi	2
b.	Konsep perencanaan kinerja unit kerja dan individu	2
c.	Menerjemahkan Rencana Kerja ke dalam Satuan Kinerja Pegawai (SKP)	2
d.	Mekanisme dan prinsip penilaian kinerja	1
4.	Kompetensi Teknis Administrasi Perkantoran	7 JP
a.	<i>Basic Office Skill</i>	3
b.	Tata Naskah Dinas	1
c.	Penulisan Surat Dinas	2
5.	Penerapan Fungsi dan Tugas ASN di Tempat Kerja	14 JP
a.	Penerapan nilai BerAKHLAK dalam fungsi dan tugas jabatan PPPK	5
b.	Konsep dan ruang lingkup Keprotokolan	3
c.	Perencanaan, etika komunikasi kedinasan dan mitigasi kesalahan protokoler	2
d.	Praktek Upacara/Acara resmi	2
e.	Nilai Anti korupsi di Bawaslu	2
6.	Pre-test dan Post-test	2 JP
7.	Evaluasi Penyelenggaraan	1 JP

E. Media Pembelajaran

Media pembelajaran yang digunakan pada proses pembelajaran Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- a. bahan bacaan;
- b. bahan tayang; dan
- c. bahan lainnya yang diperlukan.

BAB III

PENYELENGGARAAN

A. Ruang Lingkup Penyelenggaraan

Ruang lingkup penyelenggaraan orientasi meliputi:

1. perencanaan yang meliputi mekanisme perencanaan, kepesertaan, fasilitasi dan pendanaan;
2. pelaksanaan yang meliputi waktu pelaksanaan, jadwal, evaluasi dan sertifikat pelatihan;
3. monitoring dan evaluasi.

B. Perencanaan

a. Mekanisme perencanaan

1. Puslitbangdiklat menyampaikan Kebijakan Penyelenggaraan Orientasi PPPK - Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika Instansi kepada Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi.
2. Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi menyampaikan surat usulan penyelenggaraan Orientasi PPPK Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika Instansi yang memuat : metode penyelenggaraan (*blended-learning* atau *distance-learning*), jadwal pelaksanaan Orientasi PPPK, Daftar Peserta, Tim Kerja/Penyelenggara dan Tim Pengajar kepada Sekretaris Jenderal melalui Puslitbangdiklat Bawaslu Republik Indonesia; dan
3. Puslitbangdiklat Bawaslu Republik Indonesia memberikan surat balasan tentang persetujuan pelaksanaan Orientasi PPPK Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika Instansi.

b. Jadwal pelaksanaan

Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi mengusulkan jadwal pelaksanaan sesuai dengan jadwal pembelajaran pada Pedoman ini berdasarkan metode penyelenggaraan yang akan digunakan. Jadwal pelaksanaan dapat disusun secara kontinyu tanpa jeda hari maupun dengan jeda hari kerja dan hari libur dengan tetap memperhatikan urutan hari pembelajaran sesuai Kurikulum.

c. Daftar peserta

Calon peserta Orientasi PPPK yang diusulkan oleh Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi adalah PPPK Tahun pelantikan 2023, 2024, 2025 tahap 1 & tahap 2 yang belum mengikuti Orientasi. Selanjutnya, calon peserta akan didaftarkan pada LMS Bawaslu untuk mengikuti pembelajaran dan akses kepesertaan melalui LMS Bawaslu, dengan format usulan peserta sebagai berikut :

No.	Nama Peserta	Email	NIP	Jabatan	Provinsi	Kab/Kota/Bagian
1.						
2.						

d. Tim kerja/pelaksana

Susunan Tim kerja/pelaksana yang diusulkan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi sekurang-kurangnya terdiri dari :

- Penanggung jawab (Ketua, Anggota dan Kasek Bawaslu Provinsi)
- Ketua Tim Pelaksana (Kepala Bagian atau JF Ahli Muda pada Sekretariat Bawaslu Provinsi)
- Wakil Ketua (Kabag/Kasubbag/JF Ahli muda/JF Ahli Pertama)
- Sekretaris
- Anggota 1
- Anggota 2
- Dst.

e. Tim pengajar

Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi mengusulkan nama Pengajar berdasarkan mata pelatihan yang diampu. Pengajar yang diusulkan harus mampu menguasai mata pelatihan yang diampu. Pengajar yang diusulkan adalah :

- Widyaiswara Puslitbangdiklat Bawaslu
- Ketua/Anggota Bawaslu/Panwaslih Provinsi
- Ketua/Anggota Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/kota
- Pejabat Struktural Bawaslu/Panwaslih Provinsi
- Pejabat Fungsional Bawaslu/Panwaslih Provinsi
- Pejabat Struktural Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota
- Pengajar eksternal dengan kriteria tertentu (menyesuaikan ketersediaan anggaran)

f. Pembiayaan

Pembiayaan program orientasi dibebankan kepada DIPA masing-masing unit kerja.

C. Pelaksanaan

1. Orientasi PPPK - Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) dilaksanakan dengan opsi *Blended Learning* dan *Distanced Learning*;
- 2) *Blended Learning* dilaksanakan dengan menggabungkan pembelajaran tatap muka klasikal dan pembelajaran mandiri (*Asynchronous*) melalui LMS Bawaslu dengan jumlah Jam Pelatihan sebanyak 50 JP (30JP *Synchronous* dan 20 JP *Asynchronous*);
- 3) *Distanced Learning* dilaksanakan melalui pembelajaran daring menggunakan zoom meeting (*Synchronous*) dan pembelajaran mandiri menggunakan LMS Bawaslu dengan jumlah Jam Pelatihan sebanyak 50 JP (25JP *Synchronous* dan 25 JP *Asynchronous*);
- 4) Pelaksanaan tatap muka klasikal bertempat di Provinsi tempat kedudukan Peserta;

- 5) hanya dilaksanakan 1 (satu) kali selama menjabat sebagai PPPK;
 6) Jadwal pembelajaran secara terperinci adalah sebagai berikut:
 a. *Blended Learning*

JADWAL ORIENTASI PPPK						
Hari ke-1						
Waktu	Durasi	JP	Mata Pelatihan		Jenis	Metode
8:00 - 8:45 AM	45	1	Agenda I	Kebijakan orientasi PPPK	Klasikal	Ceramah
8:45 AM - 10:15 AM	90	2		Tata tertib dan alur pembelajaran dan pernyataan komitmen belajar	Klasikal	Ceramah
10:15 AM - 11:00 AM	45	1		Pretest	Klasikal	LMS
11:00 AM - 12:00 PM	60		Istirahat			
12:00 PM - 2:15 PM	135	3	Agenda IV	Basic Office Skills	Klasikal	praktek
2:15 PM - 3:00 PM	45	1		Tata Naskah Dinas	Klasikal	praktek
3:00 PM - 4:30 PM	90	2		Penulisan Surat Dinas	Klasikal	praktek
Hari ke-2						
Waktu	Durasi	JP	Mata Pelatihan		Jenis	Metode
-	90	2	Agenda I	Visi, misi, dan sasaran strategis Bawaslu	Self Learning (Modul & Video LMS)	Asynchronous
-	90	2		Peran dan kedudukan PPPK dalam pencapaian Renstra	Self Learning (Modul & Video LMS)	Asynchronous
-	90	2		Struktur organisasi Bawaslu pusat dan daerah	Self Learning (Modul & Video LMS)	Asynchronous
-	90	2		Pola hubungan kerja, koordinasi, dan pelaporan	Self Learning (Modul & Video LMS)	Asynchronous
Hari ke-3						
Waktu	Durasi	JP	Mata Pelatihan		Jenis	Metode
-	90	2	Agenda II	Kedudukan dan jenis jabatan PPPK dalam sistem ASN dan organisasi Bawaslu	Self Learning (Modul & Video LMS)	Asynchronous
-	90	2		Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan PPPK	Self Learning (Modul & Video LMS)	Asynchronous
-	90	2	Agenda III	Konsep dan siklus manajemen kinerja organisasi	Self Learning (Modul & Video LMS)	Asynchronous
-	135	3	Agenda V	Penerapan nilai BerAKHLAK dalam fungsi dan tugas jabatan PPPK	Self Learning (Modul & Video LMS)	Asynchronous
-	135	3	Agenda V	Konsep, ruang lingkup keprotokolan, Dasar hukum (UU Keprotokolan, aturan turunan), dan Prinsip tata tempat, tata upacara, tata penghormatan	Self Learning (Modul & Video LMS)	Asynchronous
Hari ke-4						
Waktu	Durasi	JP	Mata Pelatihan		Jenis	Metode
8:00 AM - 8:45 AM	45	1	Agenda I	Peran PPPK dalam organisasi Bawaslu	Klasikal	Ceramah
8:45 AM - 9:30 AM	45	1	Agenda II	Peran PPPK dalam mendukung pelaksanaan tugas unit kerja	Klasikal	Ceramah
9:30 AM - 11:00 AM	90	2		Studi kasus pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PPPK	Klasikal	praktek
11:00 AM - 12:30 PM	90	2	Agenda III	Perencanaan kinerja organisasi, unit kerja, dan individu (PPPK)	Klasikal	praktek
12:30 PM - 1:30 PM	60		Istirahat			
1:30 PM - 3:00 PM	90	2	Agenda III	Penyusunan rencana kinerja dan indikator kinerja PPPK	Klasikal	praktek
3:00 PM - 3:45 PM	45	1	Agenda III	Mekanisme, prinsip, dan tindak lanjut penilaian kinerja PPPK	Klasikal	praktek
Hari ke-5						
Waktu	Durasi	JP	Mata Pelatihan		Jenis	Metode
8:00 AM - 9:30 AM	90	2	Agenda V	Perencanaan kegiatan, Koordinasi lintas unit, komunikasi kedinasan dan Mitigasi kesalahan protokoler	Klasikal	praktek
9:30 AM - 11:00 AM	90	2		Urutan penghormatan pejabat, Etika penyambutan tamu, dan Penggunaan atribut resmi	Klasikal	praktek
11:00 AM - 12:30 PM	90	2		Internalisasi Nilai BerAKHLAK di Unit kerja	Klasikal	Ceramah
12:30 PM - 1:30 PM	60		Istirahat			
1:30 PM - 3:00 PM	90	2	Agenda V	Nilai Antikorupsi dan profesionalisme PPPK di Bawaslu	Klasikal	Ceramah
3:00 PM - 3:45 PM	45	1		Tes akhir orientasi PPPK	Klasikal	LMS
3:45 PM - 4:30 PM	45	1		Evaluasi program dan refleksi pembelajaran	Klasikal	praktek

b. Distanced Learning

JADWAL ORIENTASI PPPK FULL DARING							
Hari ke-1							
Waktu		Durasi	JP	Mata Pelatihan		Jenis	Metode
8:00 -	8:45 am	45	1	Agenda I	Kebijakan orientasi PPPK	Zoom Meeting (Synchronous)	Ceramah
8:45 am -	10:15 am	90	2		Tata lertib dan alur pembelajaran dan pernyataan komitmen belajar	Zoom Meeting (Synchronous)	Ceramah
10:15 am -	11:00 am	45	1		Pretest	Zoom Meeting (Synchronous)	LMS
Hari ke-2							
Waktu		Durasi	JP	Mata Pelatihan		Jenis	Metode
8:00 -	10:15 am	135	3	Agenda IV	Basic Office Skills	Zoom Meeting (Synchronous)	praktek
10:15 am -	11:45 am	90	2		Tata Naskah Dinas	Zoom Meeting (Synchronous)	praktek
11:45 am -	1:15 pm	90	2		Penulisan Surat Dinas	Zoom Meeting (Synchronous)	praktek
Hari ke-3							
Waktu		Durasi	JP	Mata Pelatihan		Jenis	Metode
-		90	2	Agenda I	Visi, misi, dan sasaran strategis Bawaslu	Self Learning (Modul & Video LMS)	Asynchronous
-		90	2		Peran dan kedudukan PPPK dalam pencapaian Renstra	Self Learning (Modul & Video LMS)	Asynchronous
-		90	2		Struktur organisasi Bawaslu pusat dan daerah	Self Learning (Modul & Video LMS)	Asynchronous
-		90	2		Pola hubungan kerja, koordinasi, dan pelaporan	Self Learning (Modul & Video LMS)	Asynchronous
-		90	2	Agenda III	Konsep dan siklus manajemen kinerja organisasi	Self Learning (Modul & Video LMS)	Asynchronous
Hari ke-4							
Waktu		Durasi	JP	Mata Pelatihan		Jenis	Metode
-		90	2	Agenda II	Kedudukan dan jenis jabatan PPPK dalam sistem ASN dan organisasi Bawaslu	Self Learning (Modul & Video LMS)	Asynchronous
-		90	2		Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan PPPK	Self Learning (Modul & Video LMS)	Asynchronous
-		45	1		Peran PPPK dalam mendukung pelaksanaan tugas unit kerja	Self Learning (Modul & Video LMS)	Asynchronous
-		135	3	Agenda V	Penerapan nilai BerAKHLAK dalam fungsi dan tugas jabatan PPPK	Self Learning (Modul & Video LMS)	Asynchronous
Hari ke-5							
Waktu		Durasi	JP	Mata Pelatihan		Jenis	Metode
-		135	3	Agenda V	Pengertian, ruang lingkup keprotokolan, Dasar hukum (UU Keprotokolan, aturan turunan), dan Prinsip tata tempat, tata upacara, tata penghormatan	Self Learning (Modul & Video LMS)	Asynchronous
-		90	2		Urutan penghormatan pejabat, Etika penyambutan tamu, dan Penggunaan atribut resmi	Self Learning (Modul & Video LMS)	Asynchronous
-		90	2		Nilai Antikorupsi dan profesionalisme PPPK di Bawaslu	Self Learning (Modul & Video LMS)	Asynchronous
Hari ke-6							
Waktu		Durasi	JP	Mata Pelatihan		Jenis	Metode
8:00 am -	8:45 am	45	1	Agenda I	Peran PPPK dalam organisasi Bawaslu	Zoom Meeting (Synchronous)	Ceramah
9:00 am -	10:30 am	90	2	Agenda II	Studi kasus pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PPPK	Zoom Meeting (Synchronous)	praktek
Hari ke-7							
Waktu		Durasi	JP	Mata Pelatihan		Jenis	Metode
8:00 am -	9:30 am	90	2	Agenda III	Perencanaan kinerja organisasi, unit kerja, dan individu (PPPK)	Zoom Meeting (Synchronous)	praktek
9:30 am -	11:00 am	90	2	Agenda III	Penyusunan rencana kinerja dan indikator kinerja PPPK	Zoom Meeting (Synchronous)	praktek
11:00 am -	11:45 am	45	1	Agenda III	Mekanisme, prinsip, dan tindak lanjut penilaian kinerja PPPK	Zoom Meeting (Synchronous)	praktek
Hari ke-8							
Waktu		Durasi	JP	Mata Pelatihan		Jenis	Metode
8:00 am -	9:30 am	90	2	Agenda V	Perencanaan kegiatan, Koordinasi lintas unit, komunikasi kedinasan dan Mitigasi kesalahan protokoler	Zoom Meeting (Synchronous)	praktek
9:00 am -	10:30 am	90	2		Internalisasi Nilai BerAKHLAK di Unit kerja	Zoom Meeting (Synchronous)	Praktek
10:00 am -	10:45 am	45	1		Tes akhir orientasi PPPK	Zoom Meeting (Synchronous)	LMS
11:00 am -	11:45 am	45	1		Evaluasi program dan refleksi pembelajaran	Zoom Meeting (Synchronous)	praktek

- 7) hari mulai dan selesai pembelajaran sesuai dengan usulan jadwal setiap unit kerja yang sudah disetujui oleh Puslitbangdiklat;
- 8) pembelajaran di LMS dilakukan sesuai dengan jadwal;
- 9) evaluasi akademik (*pre-test* dan *post-test*) dilakukan dalam bentuk soal pilihan ganda melalui LMS;

10) Penilaian peserta terdiri dari nilai kehadiran (bobot 20%), nilai evaluasi akademik (bobot 50%) dan nilai sikap dan perilaku bobot 30% saat proses pembelajaran dari tim pengajar (bobot 30%).

11) Kriteria kelulusan peserta Adalah sebagai berikut :

Kriteria	Rentang Nilai
Sangat Memuaskan	90,01 – 100
Memuaskan	80,01 – 90
Baik	70,01 – 80
Tidak Lulus	< 70

Bagi peserta yang Tidak Lulus, wajib mengikuti Orientasi PPPK kembali yang dilaksanakan oleh Provinsi lain.

2. Evaluasi pelaksanaan dan capaian pembelajaran Orientasi PPPK Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah dilakukan oleh Puslitbangdiklat Bawaslu Republik Indonesia melalui unit kerja masing-masing Peserta.

3. Surat Keterangan Pelatihan

- 1) Kepada peserta yang telah menyelesaikan seluruh program dengan baik dan dinyatakan “lulus”, diberikan Sertifikat.
- 2) Sertifikat Pelatihan diterbitkan oleh Pusitbangdiklat Bawaslu;
- 3) Bentuk sertifikat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Sertifikat dapat diberikan secara elektronik atau nonelektronik.

D. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Puslitbangdiklat Bawaslu;
2. Puslitbangdiklat melakukan monitoring seluruh tahapan perencanaan dan pelaksanaan untuk menjamin mutu pelatihan;
3. Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi sebagai pelaksana Orientasi PPPK menyampaikan laporan penyelenggaraan secara tertulis yang berisi proses penyelenggaraan dan penyampaian nilai kepada Puslitbangdiklat Bawaslu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Orientasi PPPK berakhir;
4. Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi sebagai penyelenggara Orientasi menyampaikan saran dan masukan terhadap proses penyelenggaraan Orientasi PPPK;
5. Puslitbangdiklat Bawaslu Republik Indonesia menggunakan data hasil laporan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar pertimbangan penyempurnaan program Orientasi PPPK;

BAB IV

PENUTUP

Pedoman ini merupakan panduan bagi Unit Kerja yang akan menyelenggarakan Orientasi. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan tersendiri oleh Puslitbangdiklat Bawaslu.

Sekretariat : Jl. Papandayan Selatan No. 1 Semarang
Telp. (024) 76423074
Website : jateng.bawaslu.go.id
E-mail : set.jateng@bawaslu.go.id

Nomor : B-3/KU.01/JT/05/2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Peningkata Kompetensi PNS
Dengan Sertifikasi Perbendaharaan

Semarang, 21 Mei 2026

Yth. **Kepala/Koordinator Sekretariat**
Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
di-
Tempat

Berdasarkan surat Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor S-66/PB.7/2026 tanggal 26 Januari 2026 hal Pemberian Dispensasi Sertifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kompetensi dan mempersiapkan SDM dalam mendukung percepatan UKM/Satker Mandiri di Bawaslu Kabupaten/Kota bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh PNS Angkatan 6 yang baru dilantik agar didaftarkan dan mengikuti diklat Bendahara
2. Setiap Kepala Sub Bagian/Staf PNS selain Angkatan 6 agar didaftarkan dan mengikuti diklat PPK dan/atau PPSPM
3. Bawaslu Kabupaten/Kota **yang sudah satker** mendaftarkan melalui operator simaspaten masing-masing Kabupaten/Kota
4. Bawaslu Kabupaten/Kota **yang belum satker (Non UKM)** mendaftarkan melalui operator simaspaten Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan mengisikan data melalui link berikut <https://bit.ly/DIKLATPERBENDAHARAAN2026>
5. Kepala/Koordinator Sekretariat agar melaporkan pengembangan kompetensi (sertifikasi perbendaharaan) kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
6. Untuk konfirmasi dapat menghubungi Saudara Widi Utomo (082221615222) atau Nurma Anggi Pramesti (081225577062)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Sekretariat,



Yessi Yunius, S.E., M.Si

Tembusan :

1. Sekjend Bawaslu;
2. Ketua Bawaslu Prov. Jateng;
3. Ketua Bawaslu Kab/Kota.

PENGUMUMAN

NOMOR 1/KP.06/SJ/06/2026

TENTANG

PENDAFTARAN BEASISWA PENDIDIKAN BAWASLU

Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 105/KP.06/K1/06/2026 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum tanggal 2 Juni 2026, dan dalam rangka pelaksanaan kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Universitas Indonesia (UI), bersama ini disampaikan pengumuman pembukaan pendaftaran Beasiswa berupa Bantuan Biaya Pendidikan bagi PNS Tugas Belajar Mandiri Bawaslu di Universitas Indonesia.

A. Persyaratan Pendaftaran

1. Surat Permohonan Beasiswa yang diajukan kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu RI *c.q.* Kepala Biro SDM dan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I pengumuman ini.
2. Pegawai yang telah bekerja minimal 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
3. Melampirkan fotokopi ijazah pendidikan terakhir:
 - a. DIII bagi yang akan mengikuti program S1/DIV;
 - b. S1/DIV atau yang sederajat bagi yang akan mengikuti program S2 dan/atau Profesi/Keahlian;
 - c. S2 atau yang sederajat bagi yang akan mengikuti program S3,
yang telah tercantum dalam data kepegawaian Badan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Memiliki pangkat dan golongan paling rendah:
 - a. II/b bagi yang akan mengikuti program S1 atau DIV;
 - b. III/a bagi yang akan mengikuti program S2; dan
 - c. III/b bagi yang akan mengikuti program S3;
5. Diutamakan bagi PNS Bawaslu yang bertugas di Daerah 3T;
6. Telah lulus seleksi mandiri yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia (SIMAK UI) dan/atau sedang dalam masa perkuliahan di Universitas Indonesia, maksimal semester 3 (tiga) dengan mekanisme Tugas Belajar Mandiri;
7. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 6, dibuktikan dengan Surat Kelulusan seleksi mandiri Universitas Indonesia (SIMAK UI) dan/atau Surat Keterangan aktif kuliah dari Universitas Indonesia.
8. Sudah mendapat rekomendasi **atau** Surat Keputusan (SK) Tugas Belajar Mandiri dari PPK Bawaslu;
9. Memiliki predikat kinerja dengan kategori paling rendah baik berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahunan, yang dibuktikan dengan SKP 2 (dua) tahun terakhir.
10. Mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja setingkat eselon II, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Pengumuman ini.
11. Sehat jasmani dan rohani;
12. Tidak sedang:
 - a. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - b. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
13. Tidak pernah:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - b. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau

- c. dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
14. Tidak sedang menjalani atau dicalonkan pada program Tugas Belajar Dibiayai lain dan/atau program Tugas Belajar dan/atau Tugas Belajar Mandiri diberhentikan dari jabatan;
15. Tidak sedang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi lain;
16. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 12 sampai dengan angka 15, dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani pimpinan unit kerja setingkat eselon II, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Pengumuman ini.

B. Prosedur Pendaftaran

1. Mengajukan permohonan beasiswa dengan melampirkan dokumen pendukung ke alamat email: daftarbeasiswa@bawaslu.go.id dengan format *subject*: nama_unit kerja_program studi.
2. Jadwal tahapan seleksi Beasiswa Bawaslu:

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Pendaftaran	15 Juni - 2 Juli 2026
2.	Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi	16 Juni - 2 Juli 2026
3.	Pengumuman	3 Juli 2026

C. Ketentuan Pemberian Beasiswa

1. Beasiswa diberikan kepada Pegawai dengan status PNS Tugas Belajar Mandiri sesuai dengan kebijakan anggaran Bawaslu TA. 2026-2027;
2. Beasiswa yang diberikan **hanya** untuk pembayaran biaya operasional pendidikan per semester dan ditransfer langsung ke rekening Universitas Indonesia;
3. Beasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 1, diberikan kepada PNS Tugas Belajar Mandiri maksimal satu kali pada setiap jenjang pendidikan;
4. PNS Tugas Belajar Mandiri yang dinyatakan lulus SIMAK UI dan mendapatkan Beasiswa Bawaslu, namun lokasi unit kerja asal berbeda dengan lokasi tempat melaksanakan tugas belajarnya, maka PNS tersebut ditugaskan ke unit kerja yang lokasinya sama atau dekat dengan lokasi tempat melaksanakan tugas belajarnya;
5. PNS Tugas Belajar Mandiri yang lulus seleksi Beasiswa ditetapkan dalam Keputusan PPK berdasarkan kuota rencana kebutuhan Tugas Belajar dan ketersediaan anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2026

Sekretaris Jenderal,



Ferdinand Eskol Tiar Sirait

Lampiran I
Pengumuman Nomor: 1/KP.06/SJ/06/2026

SURAT PERMOHONAN

(tempat, tanggal, tahun)

Kepada Yth.
Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
C.q. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum

Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya pengumuman mengenai pembukaan pendaftaran Beasiswa berupa bantuan biaya pendidikan bagi PNS Tugas Belajar Mandiri di Bawaslu, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan Terakhir :
Jenjang Pendidikan :
Program Studi :
Perguruan Tinggi :

dengan ini bermaksud mengajukan permohonan Beasiswa.

Bersama ini saya lampirkan dokumen pendukung untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan. Besar harapan saya untuk dapat menerima beasiswa ini.

Demikian permohonan ini saya ajukan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

(nama lengkap)
NIP.



SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada Pegawai Negeri Sipil:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk mendapatkan beasiswa berupa bantuan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan (*S1/S2/S3/Profesi/Keahlian**) melalui Tugas Belajar Mandiri, dengan Program Studi ..., Fakultas ...,di ..., pada tahun ajaran .../... . Adapun rekomendasi ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Yang bersangkutan telah memenuhi syarat administrasi untuk memperoleh beasiswa;
2. Pendidikan yang diambil sesuai dengan bidang pekerjaan dan/atau dapat menunjang peningkatan kompetensi kerja; dan
3. Proses perkuliahan dilakukan di luar jam kerja atau tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab di instansi.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal/bulan/tahun)
(jabatan pimpinan unit kerja)

(nama pimpinan unit kerja)
NIP.

**) pilih salah satu*

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

- a. tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
- b. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
- c. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- e. tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- f. tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- g. Tidak sedang menjalani atau dicalonkan pada program Tugas Belajar Dibiayai lain dan/atau program Tugas Belajar dan/atau Tugas Belajar Mandiri diberhentikan dari jabatan; dan
- h. Tidak sedang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi lain.

(tempat, tanggal/bulan/tahun)
(jabatan pimpinan unit kerja)

Materai Rp.10.000,-

(nama pimpinan unit kerja)
NIP.

Nomor : B-392/KP.06.05/SJ/06/2026 Jakarta, 25 Juni 2026
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Pembekalan Calon
Peserta Pelatihan Kepemimpinan
Pengawas (PKP) Tahun 2026

Yth. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota
(*Terlampir*)

Dengan hormat,

Dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Bawaslu Tahun 2026, akan dilaksanakan kegiatan **Pembekalan Calon Peserta PKP** secara daring sebagai sarana penyampaian informasi dan koordinasi awal terkait tahapan, mekanisme, serta ketentuan pelaksanaan pelatihan. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu berkenan menugaskan calon peserta sebagaimana tercantum dalam lampiran untuk mengikuti kegiatan dimaksud yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 25 Juni 2026
Pukul : 14.00 WIB s.d. Selesai
Link Zoom : <https://zoom.us/j/4907636562?omn=98270341547>
Meeting ID : 490 763 6562
Passcode: puslitbang

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Ferdinand Eskol Tiar Sirait

Lampiran I
Nomor : B-392/KP.06.05/SJ/06/2026
Tanggal : 25 Juni 2026

DAFTAR CALON PESERTA PKP

NO	NAMA	GOL	JABATAN	SATUAN KERJA	UNIT KERJA
1	RIZQIE GUNTUR PAHLAWAN RANDAU	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PROTOKOL	BIRO SDM DAN UMUM	BAWASLU RI
2	ILHAM FAUZAN FADLI	III/d	ANALIS MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI	
3	NOVI ARISSA ELISABETH	III/c	ANALIS MATERI SIDANG	BIRO FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	
4	MEY SISKHA SIREGAR	III/b	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	BIRO KEUANGAN DAN BMN	
5	MUHAMMAD HABIBI	III/b	ANALIS PEMILIHAN UMUM	PUSLITBANGDIKLAT	
6	CHRISSANTY HARAHAP	III/c	AUDITOR AHLI PERTAMA	INSPEKTORAT WILAYAH III	
7	EVAN HIROMY MIRAJ	III/c	PERENCANA AHLI PERTAMA	BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI	
8	RIZKI RIANA PUTRI	III/b	AUDITOR AHLI PERTAMA	INSPEKTORAT WILAYAH I	
9	DOMINIKUS CAHYO SUSETIO	III/b	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI	
10	KOMARUDIN	III/b	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	BIRO FASILITASI PENGAWASAN	
11	INDAH SAVITRI	III/b	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI	
12	NURWITA SARI	III/b	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	INSPEKTORAT WILAYAH I	
13	ADITYA HERMAWAN	III/b	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	BIRO FASILITASI PENANGANAN PELANGGARAN	
14	WIDYA MURTANINGTYAS NIAGARA	III/b	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI	
15	ADIE IWA CHATULISTIWA	III/b	WIDYAIWARA AHLI PERTAMA	PUSLITBANGDIKLAT	
16	MUHAMMAD ALI MAHDI	III/b	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI	
17	SYAH RIZAL HUMARDANI	III/c	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA	BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI	

NO	NAMA	GOL	JABATAN	SATUAN KERJA	UNIT KERJA
18	TAUFIQ	III/d	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KAB. PIDIE	PROVINSI ACEH
19	MUHAMMAD NOVRIZAL	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KOTA LANGSA	
20	ELY SHOPHITA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	KAB. ACEH BESAR	
21	MUHAMMAD RAMADHAN	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP DAN PSPP	KAB. ACEH BESAR	
22	MUHAMMAD ISKANDAR	III/c	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. ACEH TIMUR	
23	CHARLI IBNU CHALDUN	III/c	KEPALA SUBBAGIAN PP DAN PSPP	KAB. ACEH UTARA	
24	SONIA KHARISMA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KAB. TABANAN	PROVINSI BALI
25	NI KETUT RIANINGSIH W	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KAB. TABANAN	
26	WILDAN NOVA SAPUTRA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. TABANAN	
27	JOKO SURIADI	III/c	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KOTA DENPASAR	
28	AZIZAH IMAMATUN NISA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KOTA DENPASAR	
29	GUSTI AYU INDAH LESTARI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. BADUNG	
30	I PUTU ARI NUGRAHA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KAB. BADUNG	PROVINSI BANTEN
31	DIMAS AJI PANGESTU ALENDRA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP DAN PSPP	KAB. LEBAK	
32	DANI YANTANA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM, HUMAS, DATA, DAN INFORMASI	KAB. LEBAK	
33	DEVARA FEBRYDO BATUBARA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM, HUMAS, DATA, DAN INFORMASI	KAB. PANDEGLANG	
34	DITA KURNIATI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. PANDEGLANG	
35	ALVIANDINI NANDA FAJRI'AH	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	KAB. PANDEGLANG	
36	SANDY PRAYOGA	III/c	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM, HUMAS, DATA, DAN INFORMASI	KAB. SERANG	
37	PRASETYA AGUNG NUGROHO	III/c	KEPALA SUBBAGIAN PP DAN PSPP	KAB. SERANG	
38	TRI INDRA PURNAMA	III/c	KEPALA SUBBAGIAN PP DAN PSPP	KAB. TANGERANG	
39	YATI ELIS	III/c	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM, HUMAS, DATA, DAN INFORMASI	KAB. TANGERANG	
40	FILIPUS WAHYU WICAKSONO	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	KAB. TANGERANG	
41	DINKA FARISI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KOTA CILEGON	
42	AHMAD MUARIF	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KOTA CILEGON	

NO	NAMA	GOL	JABATAN	SATUAN KERJA	UNIT KERJA
43	CINDY OLIVIA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KOTA TANGERANG SELATAN	PROVINSI BENGKULU
44	RALYN DIKAR	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KAB. LEBONG	
45	MAYA DYAH UTAMI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. LEBONG	
46	SYAKIRIN	III/d	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KAB. REJANG LEBONG	
47	NURAINI JIATMIKO	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. SELUMA	
48	HERTI NENGSIH	III/d	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KAB. SELUMA	
49	ADE IRFAN SANTOSA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KAB. KULON PROGO	PROVINSI DI YOGYAKARTA
50	WINDA RIZKY ASTUTI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KOTA YOGYAKARTA	
51	I GEDE PARASARA MANELA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KAB. KEPULAUAN SERIBU	PROVINSI DKI JAKARTA
52	KARA PARITUSTA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KOTA JAKARTA BARAT	
53	PUTRI NURMALIA DEWI	III/a	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KOTA JAKARTA BARAT	
54	BERTONI SIBARANI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KOTA JAKARTA PUSAT	
55	RIZKI ARIFIANI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KOTA JAKARTA PUSAT	
56	MUHAMMAD ILHAM FAHREZA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KOTA JAKARTA PUSAT	
57	LINA FITRIANA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KOTA JAKARTA SELATAN	
58	FAJAR RODHANI PUTRA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KOTA JAKARTA SELATAN	
59	FALIYAN AL FAIZ	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KOTA JAKARTA TIMUR	
60	JULIANSYAH ZULHAM ADIMASURYA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KOTA JAKARTA TIMUR	
61	FAHMI HAKIM	III/c	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KOTA JAKARTA UTARA	
62	SAIPUL	III/d	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KAB. BONE BOLANGO	PROVINSI GORONTALO
63	RATNO SABRIANTO DAENUNU	III/d	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. BONE BOLANGO	
64	RONANSI	III/d	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. GORONTALO	
65	HAMZAH ABDUL	III/c	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KAB. GORONTALO	
66	RAHMAT MANTAU	IV/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. POHUWATO	

NO	NAMA	GOL	JABATAN	SATUAN KERJA	UNIT KERJA
67	ASNI SAIPI	III/d	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KAB. POHUWATO	PROVINSI JAMBI
68	OKY HERWANTO	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KAB. BUNGO	
69	RIKA MUGIASIH	III/d	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	
70	RIYAN ARDIANSYAH	III/c	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KAB. TEBO	
71	FARSAN ILMI AL-AIMAN	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	KAB. BANDUNG	PROVINSI JAWA BARAT
72	MUHAMMAD RAFLI RINALDHI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM, HUMAS, DATA, DAN INFORMASI	KAB. BANDUNG	
73	IQBAL NASIR	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP DAN PSPP	KAB. BANDUNG	
74	RIKI RIZKY	III/c	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. BANDUNG	
75	AFIF ALIIMUL HAKIM	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	KAB. BEKASI	
76	NOVIANTI DWI CAHYA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM, HUMAS, DATA, DAN INFORMASI	KAB. BEKASI	
77	RONALITA SITUMORANG	III/c	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. BOGOR	
78	HARTOMO	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP DAN PSPP	KAB. BOGOR	
79	CLAUDIA REBITTA DESTASESA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	KAB. BOGOR	
80	ASEP SUTANTO	III/c	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. CIAMIS	
81	MUHAMMAD PAJAR SIDIK	III/b	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM, HUMAS, DATA, DAN INFORMASI	KAB. CIAMIS	
82	LEBI NURDIANSYAH	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	KAB. CIANJUR	
83	AGUSTIN RAFIKA SARI	III/d	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. CIANJUR	
84	PERMITA ANDINI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM, HUMAS, DATA, DAN INFORMASI	KAB. CIANJUR	
85	ANWAR FAUZI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM, HUMAS, DATA, DAN INFORMASI	KAB. GARUT	
86	FENDY RIDWAN ANDRIYANTO	III/b	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM, HUMAS, DATA, DAN INFORMASI	KAB. KARAWANG	
87	FANGGI MAFAZA FIRTA NUR ALPHERATZ	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. KARAWANG	
88	MAISING TONIUS JUDIKA SIMBOLON	III/c	KEPALA SUBBAGIAN PP DAN PSPP	KAB. KARAWANG	
89	ARI SUTRISNO	III/c	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. KUNINGAN	

NO	NAMA	GOL	JABATAN	SATUAN KERJA	UNIT KERJA
90	FATIAH FIRDAUSI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. SUBANG	
91	SHERLY MONA FRISCILIA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. TASIKMALAYA	
92	DADAN DIANA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	KAB. TASIKMALAYA	
93	RIZKY ANINDYAJATI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP DAN PSPP	KAB. TASIKMALAYA	
94	FADHILA FITRIYADI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM, HUMAS, DATA, DAN INFORMASI	KAB. TASIKMALAYA	
95	MUHAMAD ANGGA PURNAMA PUTRA	III/c	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KOTA BANDUNG	
96	HAZMI NAWAWI SOFIAN	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KOTA BANDUNG	
97	RENDY TRI RACHMAWAN	III/c	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KOTA BEKASI	
98	IRWAN SURYA DARMAWAN	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KOTA BEKASI	
99	ASTRI SUHARYANTI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KOTA BEKASI	
100	IYAS MANGGALA AYUBI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KOTA BOGOR	
101	SUNDARI EKA AGUSTINA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KOTA BOGOR	
102	NUR RACHMA HAYATI	III/d	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KOTA DEPOK	
103	AZIS NUR FADILLAH	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KOTA DEPOK	PROVINSI JAWA TENGAH
104	TAMARA ARINDITA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. BANJARNEGARA	
105	RAFI ULLUDIN HIMAM	III/c	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KAB. BANJARNEGARA	
106	FIKRY HANIF	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KAB. BANJARNEGARA	
107	FAHMI NUR WICAKSONO	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KAB. BANYUMAS	
108	DWI ASTUTI HANDAYANI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KAB. BANYUMAS	
109	RETNO CATUR KUMALASARI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. BLORA	
110	AYU RIZKI PERMATASARI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KAB. BLORA	
111	ALAN AMUNDI WIBOWO	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KAB. BOYOLALI	
112	RAHADIAN HERLANGGA WISNU WARDHANA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KAB. BOYOLALI	
113	ILHAM PANUNTUN	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	KAB. BREBES	

NO	NAMA	GOL	JABATAN	SATUAN KERJA	UNIT KERJA
114	YANDI DWI HIMAWAN	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP DAN PSPP	KAB. BREBES	
115	AKH BAINI TASLIHUDIN	III/b	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM, HUMAS, DATA, DAN INFORMASI	KAB. BREBES	
116	IDA ZUHAIROH	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. DEMAK	
117	BUDIYANTO	III/c	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KAB. DEMAK	
118	POLIKARPUS JOHN BAUN	III/c	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. KARANGANYAR	
119	FERRY YUHANDA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KAB. KARANGANYAR	
120	DANU PRADANA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KAB. KARANGANYAR	
121	DIAH FEBRI ALI KURNIASIH	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. KEBUMEN	
122	NURCAHYANINGRUM OKTAVIYANTI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM, HUMAS, DATA, DAN INFORMASI	KAB. KEBUMEN	
123	CANDRA MAHESWARA PUTRA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP DAN PSPP	KAB. KEBUMEN	
124	HASBI DEWANTARA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	KAB. KEBUMEN	
125	MIZAN MALIK S	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KAB. KENDAL	
126	RICHI DEMICHEL JOHANNES	III/c	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KAB. KENDAL	
127	RAHMAWAN HIDAYAT	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. KLATEN	
128	ARSHINTA ELLEN FIADESI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	KAB. KLATEN	
129	NENENG WIDASARI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM, HUMAS, DATA, DAN INFORMASI	KAB. KLATEN	
130	YUNI KARINA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	KAB. MAGELANG	
131	FAUZIA SHOLIKHATI NURUL JANNAH	III/b	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	KAB. MAGELANG	
132	VIKA RESTU DIAN SAPUTRI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. MAGELANG	
133	SIGIT DWI PRASETYO	III/b	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM, HUMAS, DATA, DAN INFORMASI	KAB. MAGELANG	
134	FRENDI ASHAR KURNIAWAN	III/c	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. PATI	
135	BAGUS SURYONO	III/c	KEPALA SUBBAGIAN PP DAN PSPP	KAB. PATI	
136	JOHAN ROBBI MAHFUS ZHAFIRI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KAB. PURWOREJO	
137	MUHAMMAD HANIF	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KAB. REMBANG	

NO	NAMA	GOL	JABATAN	SATUAN KERJA	UNIT KERJA
138	AGUS IRNAWAN	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. REMBANG	
139	VIRENDRA EKA NOVIANTO	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KAB. SEMARANG	
140	WIDYA ASTUTI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KAB. SEMARANG	
141	ELI JULIMAS RAHMAWATI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KAB. SRAGEN	
142	GELAR RAJAWALI MAHENDRA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KAB. SRAGEN	
143	ZUKRI ARIPALDI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. SRAGEN	
144	ADHI RANGGA SOFYAN ANANTA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KAB. SUKOHARJO	
145	YOGI ARIF RAMDHANU	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KAB. TEGAL	
146	DWI AHMAD SAFRIJAL	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KAB. TEGAL	
147	ERWIN RIZKA BIANTORO	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KAB. TEMANGGUNG	
148	FITRI KURNIAWATI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KAB. TEMANGGUNG	
149	YANUAR DENY PAMBUDI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KOTA SEMARANG	
150	FERNANDA ALLICE PRADITA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KOTA SEMARANG	
151	YOSINAS MIRZA SETIAWAN	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	KAB. BANYUWANGI	PROVINSI JAWA TIMUR
152	SEPTIAN EKO SANTOSO	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP DAN PSPP	KAB. BOJONEGORO	
153	MUHAMMAD FAHRUR ROZI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM, HUMAS, DATA, DAN INFORMASI	KAB. BONDOWOSO	
154	ANAS ANSORI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KAB. GRESIK	
155	AHMAD FAISAL	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KAB. GRESIK	
156	FEDORA ADI BRATA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. JEMBER	
157	AKBAR FAHREZA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP DAN PSPP	KAB. JEMBER	
158	IKE YUNIA MARIS	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	KAB. KEDIRI	
159	NOURMA YUNIA ALDILLA RIZQA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM, HUMAS, DATA, DAN INFORMASI	KAB. KEDIRI	
160	SILVY ARISCA SUSANTI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. KEDIRI	
161	ANDHIKA WIJAYA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	KAB. LAMONGAN	

NO	NAMA	GOL	JABATAN	SATUAN KERJA	UNIT KERJA
162	ASRI SETYOWATI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP DAN PSPP	KAB. LAMONGAN	
163	HENDRA RANTUNG	III/c	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. LAMONGAN	
164	MOCH SHOLIHUL ANAM	III/b	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM, HUMAS, DATA, DAN INFORMASI	KAB. LAMONGAN	
165	FEBRIANTO ENDY PRATAMA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. MAGETAN	
166	FEBRINA WINDY ARISANTI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	KAB. MALANG	
167	FAQIH YOGA SUGAMA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. MALANG	
168	MUHAMAD ALFI ROHMAN	III/b	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM, HUMAS, DATA, DAN INFORMASI	KAB. MALANG	
169	ROCHMAN ARIF	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP DAN PSPP	KAB. MALANG	
170	DITA MUSTIKA RAMADHANI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. MOJOKERTO	
171	MEY TALIANA FACTMAWATI	III/c	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. NGANJUK	
172	DESI PIPIAN PUJAKUSUMO	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KAB. PACITAN	
173	PRISMA AGUSTIAN PRASETYA WISANDHA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. PASURUAN	
174	TOMMY YOGA ADITAMA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. PROBOLINGGO	
175	AFIF AHYA MUTTAQIN	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KAB. SIDOARJO	
176	ABDUL MUIS	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. SUMENEP	
177	JODY EL FIRLY	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KOTA BATU	
178	SAIFUL HAMMAM	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KOTA MADIUN	
179	REZA YUDHA FIRMANSYAH	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KOTA MADIUN	
180	RHOMAIDA AMBARWATI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KOTA MALANG	
181	YOGA RICKY AGUNG WICAKSONO	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KOTA MOJOKERTO	
182	AMRYZAL PERDANA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KOTA MOJOKERTO	
183	ARIA PRATOMI ADI SAPUTRA	III/d	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KOTA SURABAYA	
184	KEVIN DWITAMA JAUHARIE	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP DAN PSPP	KAB. KAPUAS HULU	PROVINSI KALIMANTAN BARAT
185	MEDYA FAHRURRAZI	III/d	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	KAB. KETAPANG	
186	RAHMAT AL KAFI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM, HUMAS, DATA, DAN INFORMASI	KAB. SINTANG	

NO	NAMA	GOL	JABATAN	SATUAN KERJA	UNIT KERJA
187	YENI MARITO MARPAUNG	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP DAN PSPP	KAB. BANJAR	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
188	NOOR HERIYANTO	III/c	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. BANJAR	
189	ANDI WAHYUDI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. TANAH LAUT	
190	YULIANTI SAFITRI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KOTA BANJARMASIN	
191	NUNING KUSUMA WARDANI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KOTA BANJARMASIN	
192	NORISA AMELIA	III/c	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KOTA BANJARMASIN	
193	NEPI HARYUNI JAYANTI UTAMIE	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KAB. BARITO SELATAN	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
194	ARIF RAHMAN PAMUNGKAS	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KAB. BARITO SELATAN	
195	BRIAN RAYNOLD PANGONDIAN	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KAB. KOTAWARINGIN BARAT	
196	TIARA APRILI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KAB. KOTAWARINGIN BARAT	
197	KRISTIANNICO	III/c	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM, HUMAS, DATA, DAN INFORMASI	KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	
198	SARINTA BR GINTING	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP DAN PSPP	KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	
199	MUHAMMAD CHASANDRA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KOTA PALANGKA RAYA	
200	SUANRO	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KOTA PALANGKA RAYA	
201	SARINAH	III/b	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM, HUMAS, DATA, DAN INFORMASI	KAB. KUTAI KARTANEGARA	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
202	FAHMI WAHYUDI	III/d	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. KUTAI KARTANEGARA	
203	TRI WARDANA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. KUTAI TIMUR	
204	EKA DUALOLO	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KAB. PASER	
205	AWATAR WISYA FATWA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KOTA BALIKPAPAN	
206	MUHAMMAD HENDRA WIJAYA NUGRAHA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KOTA BALIKPAPAN	
207	SINHA IMA META PUTRI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KOTA BALIKPAPAN	
208	TITO DWI HIDAYAT	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KOTA SAMARINDA	
209	HENDRAWAN SITUMORANG	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. NUNUKAN	PROVINSI KALIMANTAN UTARA
210	MUHAMMAD AL HASAN	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP DAN PSPP	KAB. NUNUKAN	

NO	NAMA	GOL	JABATAN	SATUAN KERJA	UNIT KERJA
211	ZUHRI FITRAYANTA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. BANGKA	PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
212	ARIE BENEDICT PARDEDE	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KAB. BANGKA TENGAH	
213	EDWIN TIRTA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. BANGKA TENGAH	
214	FAHREZA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KAB. BELITUNG TIMUR	
215	DWI SUHARANI RAJA GUK GUK	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. BINTAN	PROVINSI KEPULAUAN RIAU
216	WAHYU NUR LAILI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KAB. BINTAN	
217	SAHAT F RIVAI LUMBAN TORUAN	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KOTA BATAM	
218	VIVI SUSANTI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KOTA BATAM	
219	PUTRI LARASATI ANGGIAWAN	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KOTA BATAM	
220	M.AFANDI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KOTA TANJUNGPINANG	
221	VERA MARINI SITUMEANG	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KOTA TANJUNGPINANG	PROVINSI LAMPUNG
222	AMRI FAHADA SYEHRUN	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KAB. PESAWARAN	
223	RIKI SEPRIYANDA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. PESAWARAN	
224	REZZA BASTIAN SAPUTRA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KOTA METRO	
225	HADI SUSANTO	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KOTA METRO	PROVINSI MALUKU
226	RUDIN	III/c	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KAB. BURU SELATAN	
227	HAMISAN BONE	III/d	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. BURU SELATAN	
228	SALMAN	III/c	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KAB. BURU SELATAN	
229	WATI ALWI	III/c	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM, HUMAS, DATA, DAN INFORMASI	KAB. MALUKU TENGAH	
230	HERLIN CATHY SIAHAYA	III/c	KEPALA SUBBAGIAN PP DAN PSPP	KAB. MALUKU TENGAH	
231	MUHAMMAD AMIN LAUSIRY	III/d	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	
232	AGUS IRAWAN	III/c	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KAB. KEPULAUAN TANIMBAR	PROVINSI MALUKU UTARA
233	JULISTINY REDJEB	III/d	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM, HUMAS, DATA, DAN INFORMASI	KAB. HALMAHERA SELATAN	
234	FAHRUDIN IBRAHIM MARADJABESSY	III/c	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KOTA TERNATE	

NO	NAMA	GOL	JABATAN	SATUAN KERJA	UNIT KERJA
235	SALIM BAKIR	III/d	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KOTA TIDORE KEPULAUAN	
236	MUHLIS MAULANA IBRAHIM	III/c	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	PROVINSI MALUKU UTARA	
237	MARIAM	III/d	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. BIMA	
238	ENDANG DEWI NURNI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KAB. DOMPU	PROVINSI NUSA TENGGERA BARAT
239	MAHISA MAREATI	III/d	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KAB. DOMPU	
240	MUHAMAD TAISIR	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KAB. LOMBOK TENGAH	
241	SUPRIYANI	IV/a	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. LOMBOK TIMUR	
242	AMRULLAH	III/c	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	KAB. SUMBAWA	
243	AGUS HIDAYAT	III/c	KEPALA SUBBAGIAN PP DAN PSPP	KAB. SUMBAWA	
244	EDY RAMLI	III/d	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. SUMBAWA	
245	MURNI KURNIA	IV/a	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KOTA MATARAM	
246	ERWIN RIZKA BIANTORO	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KOTA MATARAM	
247	RESYID ABU BAKAR	III/d	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KAB. ENDE	PROVINSI NUSA TENGGERA TIMUR
248	KURNIAWAN PAKPAHAN	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	KAB. KUPANG	
249	ANSELMA DUDIS KARTINI	III/c	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. MALAKA	
250	JESSY DIEGO FRANS ALNABE	III/c	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KAB. MALAKA	
251	MARSELINUS TONGGO	III/d	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KAB. MANGGARAI	
252	CHRISTIAN NATANIEL HERI WULANG	III/d	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	KAB. SUMBA TIMUR	
253	RINA RUTH OCTARIANA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	KAB. JAYAPURA	PROVINSI PAPUA
254	KHALEB ROBERT RUMERE	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. SUPIORI	
255	ANDRIAN GREENFULL BELLOY	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KOTA JAYAPURA	
256	YUSTUS FERDINAND WAIMBO	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KOTA JAYAPURA	
257	ALAN DOWANSIBA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KAB. MANOKWARI SELATAN	PROVINSI PAPUA BARAT
258	ALBERTHO MILIAN RUMAIKEWI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KAB. MANOKWARI SELATAN	
259	MUHAMMAD HASANUL ASY'ARY	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP DAN PSPP	KAB. BENGKALIS	PROVINSI RIAU

NO	NAMA	GOL	JABATAN	SATUAN KERJA	UNIT KERJA
260	BARITO GRINCA PAHALA SILALAH	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	KAB. INDRAGIRI HILIR	
261	RESSY PUSPITA SARI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. KUANTAN SINGINGI	
262	GITA HARDI WIRA SUKMA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP DAN PSPP	KAB. KUANTAN SINGINGI	
263	MUTIARA FRITCILLIANA PANJAITAN	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KAB. PELALAWAN	
264	ADITYA AL JAMIL	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KAB. ROKAN HULU	
265	LIZA APRIANA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. ROKAN HULU	
266	DESRIVINA RAMKAS OKTAVIANI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. SIAK	
267	GIRI SINDORO FITRIANSYAH	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KOTA DUMAI	
268	M TAUFIK	III/d	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. MAJENE	PROVINSI SULAWESI BARAT
269	MUH. NUR	III/c	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KAB. MAJENE	
270	WAWAN SULVIANTONO	III/d	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KAB. MAMUJU	
271	SRI MADA HASTI	III/c	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KAB. MAMUJU	
272	AMRAN BURGAN	III/d	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KAB. MAMUJU TENGAH	
273	ROSLAENI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KAB. BANTAENG	PROVINSI SULAWESI SELATAN
274	ZUBAIR	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	KAB. BONE	
275	RAKHMAT HIDAYAT	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP DAN PSPP	KAB. BONE	
276	ANDI MUHFI ZANDI M	III/b	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM, HUMAS, DATA, DAN INFORMASI	KAB. BONE	
277	RAHMAWATI NURDIN	III/c	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	
278	TAUFIK RIZAL	III/b	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM, HUMAS, DATA, DAN INFORMASI	KAB. LUWU	
279	MUHAMMAD ABDULLAH	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	KAB. LUWU	
280	INDRASTUTI HANDAYANI FARIDA	III/d	KEPALA SUBBAGIAN PP DAN PSPP	KAB. LUWU	
281	SYAMSU ALAM	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KAB. MAROS	
282	SUDARJO	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KAB. PINRANG	
283	A. ABDULLAH BAKRI	III/d	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KAB. PINRANG	
284	RATNAWATI	III/d	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KAB. TAKALAR	

NO	NAMA	GOL	JABATAN	SATUAN KERJA	UNIT KERJA
285	ANDI ISWAN NUR	III/c	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KAB. TAKALAR	
286	MUH. ADITYA IBRAHIM	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KAB. TANA TORAJA	
287	AHMAD FUADI SEHUDDIN	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KOTA MAKASSAR	
288	RUSNIATI	III/b	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	PROVINSI SULAWESI SELATAN	
289	APRIANTO NUGRAHA PUTRA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP DAN PSPP	KAB. DONGGALA	
290	RYAN APRILianto	III/b	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM, HUMAS, DATA, DAN INFORMASI	KAB. DONGGALA	PROVINSI SULAWESI TENGAH
291	RAHMA YANI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KAB. MOROWALI	
292	SIGIT HARDIANTORO	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KAB. SIGI	
293	MURSALIN	III/c	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. BUTON	
294	MUH. IRHAM ROSADI L	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KAB. KOLAKA	PROVINSI SULAWESI TENGGARA
295	MIRNAWATY ANDRIANI	IV/a	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KAB. KOLAKA	
296	SAFRIANSYAH	IV/a	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. KOLAKA TIMUR	
297	SURYONO ACHMAT DJIWA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KAB. KOLAKA TIMUR	
298	DIRWAN KALAM SAHIRSAN	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KAB. KOLAKA TIMUR	
299	ANDI SULHAN	III/c	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. KONAWE	
300	MEGAWATY NURUL HIDAYAH	III/c	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. KONAWE SELATAN	
301	AHMAD ISKANDAR ZULKARNAIN	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KAB. KONAWE UTARA	
302	JEMIRIANTI	III/d	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KAB. KONAWE UTARA	
303	LA IDA	IV/a	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KAB. MUNA	
304	NURMILA	III/d	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. WAKATOBI	
305	NUR ASHAR	IV/a	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KOTA BAU-BAU	
306	LA ODE MUHAMAD SUHARJONO	IV/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KOTA BAU-BAU	

NO	NAMA	GOL	JABATAN	SATUAN KERJA	UNIT KERJA
307	HAMDAN TAHIR	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KAB. BOLAANG MONGONDOW	PROVINSI SULAWESI UTARA
308	RAMONA LENY GAGHANA	III/c	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	
309	ANGELICA OLIVIA WANGKAI	III/d	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KAB. MINAHASA	
310	CLAUDIA LIDIA VIRGINA SHARON MANUS	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KAB. MINAHASA	
311	HARDI DEWANTORO KARASERAN	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KOTA BITUNG	
312	MEYHARD REINALDI SUALANG	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KOTA BITUNG	
313	ERVINA ELVIRA JAQULINE MAIT	IV/a	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KOTA MANADO	
314	WELTRI HAPPY DAUD	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KOTA MANADO	
315	PRIMA NUGRAHA S. SINAGA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KAB. LIMA PULUH KOTA	PROVINSI SUMATERA BARAT
316	M. HAZNIL	III/d	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. PADANG PARIAMAN	
317	DANNY WANDIRA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM, HUMAS, DATA, DAN INFORMASI	KAB. PASAMAN BARAT	
318	ISNAN DIYAH	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	KAB. PASAMAN BARAT	
319	RIYAN ALGHI FERMANA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM, HUMAS, DATA, DAN INFORMASI	KAB. PESISIR SELATAN	
320	SINDI SYAHMITA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP DAN PSPP	KAB. PESISIR SELATAN	
321	ARINIA MARIZA DELLA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM, HUMAS, DATA, DAN INFORMASI	KAB. SOLOK	
322	YUSRITA RIVA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KAB. TANAH DATAR	
323	FERDHY ASWINDO	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KOTA PADANG	
324	RINTO AMARTA WIGUNA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KOTA PADANG	
325	MIZLIN HARDI	III/c	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	KAB. AGAM	
326	RASMI JUWITA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP DAN PSPP	KAB. AGAM	
327	ZIKRI AFIF	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. AGAM	
328	NAZIRWAN	III/c	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM, HUMAS, DATA, DAN INFORMASI	KAB. BANYUASIN	PROVINSI SUMATERA SELATAN
329	ENDAH KUSUMA WARDHANI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. MUSI BANYUASIN	

NO	NAMA	GOL	JABATAN	SATUAN KERJA	UNIT KERJA
330	ANNISAA ROZA SYABILA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KAB. OGAN ILIR	
331	MUHAMMAD REZZA ADITHIA	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. OGAN ILIR	
332	SHOFI NINDYA KISWANTI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM, HUMAS, DATA, DAN INFORMASI	KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN	
333	ARDI SETYAWAN	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP DAN PSPP	KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN	
334	RAY BACHTIAN RANGKUTI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KAB. LABUHANBATU	PROVINSI SUMATERA UTARA
335	ASRUL AZIS	III/d	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	KAB. MANDAILING NATAL	
336	MONICA PURADA TAMBUNAN	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP DAN PSPP	KAB. MANDAILING NATAL	
337	PATRIANUS MANAO	III/d	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM, HUMAS, DATA, DAN INFORMASI	KAB. NIAS SELATAN	
338	WELDIMAN BOANGMANALU	III/d	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KAB. PAKPAK BHARAT	
339	SUPRYANTO BANCIN	III/d	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KAB. PAKPAK BHARAT	
340	RIYANDA FAZRI	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	KAB. SIMALUNGUN	
341	MANTILY SRI ASTUTI HUTAURUK	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KAB. TOBA	
342	ZULKIFLI SITOPU	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KAB. TOBA	
343	MAYA ANGELA MANURUNG	III/d	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. TOBA	
344	ISABELLA MARIA AGAVE HUTABARAT	III/b	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KOTA MEDAN	
345	ROFI FARDIAL	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PP PSPP DAN HUKUM	KOTA MEDAN	
346	SELMIKA MANURUNG	III/d	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KOTA PADANGSIDIMPUAN	
347	RIZKI DWI PRASETYO	III/b	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	KAB. ASAHAN	
348	HERLINA	III/c	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KAB. ASAHAN	
349	M. FADLI NST	III/c	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM, HUMAS, DATA, DAN INFORMASI	KAB. ASAHAN	